

Sistem, Strategi dan Program Pengembangan Agribisnis



**Badan Agribisnis Departemen Pertanian
Republik Indonesia 1995**



Bibliografi

Sistem, Strategi dan Program Pengembangan Agribisnis



31
D
S
16-291
2029
S



**Badan Agribisnis Departemen Pertanian
Republik Indonesia 1995**



PENGANTAR



Pengembangan agribisnis sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1993 semakin dirasakan kebutuhannya sebagai penghela pembangunan pertanian. Melalui pengembangan agribisnis secara berencana dan terpadu diharapkan dapat ditingkatkan pendapatan petani nelayan melalui penerimaan sebagai nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, dengan dampak peningkatan produktivitas angkatan kerja pertanian.

Amanat tersebut di atas telah direfleksikan oleh Departemen Pertanian dalam penyempurnaan strukturnya dengan dibentuknya Badan Agribisnis melalui **Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 1993**. Tugas pokok Badan ini adalah mempersiapkan langkah - langkah yang diperlukan guna mendorong berkembangnya agribisnis, termasuk agroindustri.

Fungsi Badan Agribisnis sebagaimana dijabarkan dalam **Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96 / KPTS / OT. 210 / 2 / 1994** adalah :

- (a) merumuskan kebijaksanaan teknis pengembangan agribisnis,
- (b) merumuskan program dan pembinaan kegiatan pengembangan agribisnis
- (c) melaksanakan kegiatan standardisasi, pengembangan pasar dan informasi pasar, kemitraan usaha, pengembangan pola investasi dan permodalan serta penanganan Amdal, dan
- (d) melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkungan Badan.

Guna mengejawantahkan mandat dan fungsi tersebut secara *berencana, terpadu dan berkelanjutan*, buku **Sistem, Strategi dan Program Pengembangan Agribisnis** ini disusun, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman menyelaraskan gerak langkah segenap masyarakat agribisnis ---termasuk instansi dan aparat pemerintah baik Pusat maupun Daerah ---, dalam menuju kepada **era Pertanian Indonesia yang tinggal landas**

Jakarta, Januari 1995
Kepala Badan Agribisnis,

Dr. Ir. H. Dudung Abdul Adjid



DAFTAR ISI

Halaman

	PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
I.	PENDAHULUAN	1
II.	TANTANGAN, PELUANG DAN PROSPEK PERKEMBANGAN AGRIBISNIS	3
	1. Lingkungan Strategik	7
	2. Permintaan	8
	3. Sumberdaya	9
	4. Ilmu dan Teknologi	10
III.	WAWASAN DAN SISTEM AGRIBISNIS	11
IV.	STRUKTUR DAN TATALAKU MASYARAKAT AGRIBISNIS	16
V.	STRATEGI PEMBANGUNAN AGRIBISNIS	20
	1. Eksistensi Semua Komponen Sistem Agribisnis Secara Lengkap di Pedesaan	21
	2. Wirausaha dan Kemitraan Usaha	22
	3. Iklim Lingkungan yang Kondusif	23
	4. Gerakan Nasional Pembangunan Agribisnis	23
VI.	PERANGKAT PENUNJANG OPERASIONAL PEMBINAAN AGRIBISNIS	26
	Pembinaan Standardisasi dan Akreditasi	26
	Pengembangan dan Informasi Pasar	28
	Pengembangan Usaha dan Hubungan Kelembagaan	29
	Pengembangan Investasi dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	31
VII.	TATALAKSANA	33
	Perencanaan dan Rancang Bangun	33
	Bimbingan	41
	Koordinasi	47
VIII.	PENUTUP	54



I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dalam REPELITA VI adalah pembangunan ekonomi dengan memperkuat kekuatan industri dan pertanian seiring dengan pembangunan bidang lainnya serta berporos kepada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dalam rangka pembangunan industri nasional diusahakan penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung oleh peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan ketangguhan pertanian, pemantapan sistem kelembagaan koperasi, penyempurnaan perdagangan, jasa, distribusi, disertai dengan pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor produksi, sumberdaya ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya masyarakat maju yang menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan rakyat.

Tersirat pada uraian di atas bahwa proses perkembangan pembangunan ekonomi menghendaki adanya berbagai tindakan penyesuaian. Penyesuaian tersebut memerlukan reorientasi pembangunan pertanian agar proses pembangunan pertanian yang berangkat dari orientasi peningkatan produksi pada PJP I, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategiknya menjadi proses pembangunan yang berwawasan agribisnis yang kompetitif dan secara sistemik dirancang untuk bermuara pada kesejahteraan yang adil dan merata.

Reorientasi arah pembangunan pertanian tersebut pada dasarnya adalah rancangan strategik untuk dapat menjawab tantangan-tantangan masa depan, yang pada hakekatnya merupakan antisipasi untuk menangkap signal-signal dari adanya kecenderungan dan perubahan lingkungan strategik, baik lingkungan global maupun Nusantara.

Meskipun ada perubahan orientasi dan wawasan tetapi tujuan pembangunan pertanian tetap konsisten diarahkan kepada perwujudan amanat pembangunan nasional, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani-nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memenuhi permintaan dan memperluas pasar (baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri); melalui pengembangan postur pertanian yang maju, efisien dan tangguh, serta yang semakin mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan wilayah.



Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, secara sadar dilakukan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sistem agribisnis dengan agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Terkait dengan iklim kondusif itu, perlu ditanggapi berbagai kecenderungan-kecenderungan yang berimplikasi perlunya pergeseran peran dan perilaku birokrasi, seperti mengurangi campur tangan pemerintah dalam mekanisme ekonomi dan pasar, serta adanya dunia swasta yang mampu menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian. Pemerintah berusaha menumbuhkan iklim kondusif tersebut. Salah satu diantaranya adalah langkah restrukturisasi Departemen Pertanian melalui Keppres 83/1993 yang membentuk Badan Agribisnis pada Departemen Pertanian. Badan Agribisnis berdasarkan SK. Mentan No. 96/Kpts/OT.210/2/1994 mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan agribisnis dalam rangka menunjang penyelenggaraan misi Departemen Pertanian dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan agribisnis.
- b. Perumusan program dan pembinaan kegiatan pengembangan agribisnis.
- c. Pelaksanaan kegiatan standardisasi, pengembangan pasar dan informasi pasar, kemitraan usaha, pengembangan pola investasi dan permodalan serta penanganan Amdal.
- d. Pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Badan.

Sebagai panduan bagi perumusan kebijakan, program dan operasionalisasi kegiatan dalam rangka pengembangan agribisnis tersebut perlu dijabarkan landasan konseptual sosok sistem agribisnis dan strategi umum dari upaya pembangunannya. Inilah maksud dari ditulisnya naskah ini.



II. TANTANGAN, PELUANG DAN PROSPEK PERKEMBANGAN AGRIBISNIS

Secara asasi karena sifatnya sebagai industri yang bertumpu kepada proses biologis, dunia pertanian adalah dunia pedesaan. Data statistik menunjukkan lebih dari 54 persen dari angkatan kerja pedesaan bermata pencaharian di bidang pertanian dengan rata-rata pendapatan relatif lebih rendah dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang bekerja di sektor lain dan yang tinggal di perkotaan. Selama 25 tahun terakhir sektor industri mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu rata-rata sekitar 12 persen per tahun. Pertumbuhan yang cepat ini telah meningkatkan sumbangannya dalam produk domestik bruto dari 9,2 persen dalam tahun 1969 menjadi 21 persen dalam tahun 1992. Sementara itu, meskipun produksi pertanian juga terus meningkat, namun sumbangannya kepada produksi nasional telah menurun dari 49,3 persen dalam tahun 1969 menjadi 19,2 persen dalam tahun 1992. Ilustrasi spesifik lainnya yang dapat diungkapkan adalah perbandingan PDB rata-rata per tenaga kerja di sektor pertanian dengan sektor industri (1988) yang besarnya 1 berbanding 5. Suatu kenyataan faktual yang relatif belum sesuai dengan nilai dan norma pembangunan ekonomi yang berlandaskan Pancasila.

Rendahnya pendapatan penduduk pedesaan, terutama yang bekerja di sektor pertanian ada hubungannya dengan struktur pertanian/pedesaan yang kurang kondusif bagi perkembangan agribisnis yang dinamik dan kompetitif, karena sosok usahatani yang lemah prasarana, fisik dan non fisik yang masih belum memadai, serta terbatasnya jangkauan pasar. Kita semua mengetahui bahwa hampir seluruh produksi pangan dan sebagian besar produksi hasil perkebunan, peternakan dan perikanan adalah hasil dari jerih payah petani, peternak dan nelayan yang bertumpu kepada usahatani keluarga yang berlahan sempit, yang didukung dengan sumberdaya manusia dan iptek yang masih tertinggal. Kondisi struktural demikian itu menyebabkan terbatasnya kemampuan petani untuk menjangkau sarana produksi dan kesempatan memperoleh sinergi yang diperlukannya untuk berkembang.

Sementara itu, data Susenas 1990 mengungkapkan secara agregat di wilayah pedesaan tampak telah terjadi transformasi struktural, dimana selama kurun waktu tiga tahun pangsa pertanian terhadap pendapatan rumah tangga telah turun dari 46,8 persen menjadi 45,1 persen, sedangkan pangsa gaji dan upah (industri, perdagangan dan jasa) meningkat dari 28,9 persen



menjadi 30,6 persen, dimana peranan industri rumah tangga selama periode 1987- 1990 relatif stabil dengan pangsaanya sekitar 1 persen.

Di dalam hal perkembangan investasi di pedesaan, secara umum dapat disimpulkan bahwa penanaman modal di bidang pertanian jauh ketinggalan dibandingkan dengan penanaman modal di sektor manufaktur dan jasa. Sebagai ilustrasi, data kumulatif persetujuan PMDN sampai dengan 31 Januari 1994 menunjukkan investasi PMDN pada sektor pertanian hanya sekitar 13,5 persen, sementara sektor sekunder dan tertier masing-masing mencapai 66,8 persen dan 19,7 persen.

Ditinjau dari aspek dukungan pendanaan dari perbankan, ternyata investasi pertanian juga sangat kurang diminati dunia usaha. Hal ini menjadi salah satu indikator dari adanya suku bunga perbankan yang dirasakan terlalu tinggi untuk usahatani di pedesaan dan fakta bahwa lembaga dan sistem perbankan belum sepenuhnya menjangkau petani, baik dari segi kelembagaan maupun prosedurnya. Andaikata jangkauan tersebut sampai kepada sasarannya, ternyata lembaga perbankan justru telah menjadi sarana untuk mengalirkan dana dari pedesaan ke perkotaan, karena pedesaan lebih banyak menyimpan daripada meminjam. Disini terlihat bahwa keteringgalan dan keterbatasan petani ternyata merupakan faktor kondisional yang berada dibalik mengalirnya dana dari pedesaan ke perkotaan tersebut.

Kondisi lain yang ikut memperlambat laju penanaman modal di sektor pertanian adalah keharusan untuk sejak awal menerapkan pendekatan terpadu yang utuh. Sebagian besar produk pertanian mempunyai karakteristik yang mudah rusak dan bervolume besar dibandingkan dengan nilainya. Penanganan pasca panen, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan lancarnya pemasaran menjadi sangat penting. Apabila penanam modal tidak mampu menerapkan prinsip integrasi vertikal dalam investasinya, maka ia terpaksa harus bergantung kepada adanya investasi lain yang menjamin hadimya semua mata rantai yang diperlukan agar produknya dapat dipasarkan dengan baik.

Hal-hal lain yang juga memberikan peran dalam memperlebar kesenjangan antar wilayah maupun diantara masyarakat pedesaan sendiri, adalah : **Pertama**, apa yang kita sebut dengan kegagalan pasar. Dari pengalaman selama ini dapat ditunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang mengandalkan pada kekuatan pasar saja justru hanya dinikmati



oleh masyarakat kelas menengah ke atas Masyarakat ekonomi lemah termasuk didalamnya petani kecil di pedesaan tidak sepenuhnya mampu memanfaatkannya. Kedua, kebijaksanaan yang cenderung bersifat uniform. Seperti kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara kepulauan yang mempunyai keragaman tinggi. Homogenitas kebijaksanaan pembangunan baik regional maupun sektoral, tanpa memperhatikan keragaman di atas, akan menghasilkan respon yang berbeda antara pelaku ekonomi yang kuat dan yang lemah maupun antara daerah yang kzya dengan sumberdaya alam dan prasarana dengan daerah yang miskin.

Berhadapan dengan berbagai tantangan yang menggugah tekad untuk menghadapinya itu, terbuka luas peluang berkembangnya agribisnis untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri akan berbagai hasil pertaniannya, yang lokasi dan sumberdayanya berada di Indonesia, serta didukung dengan sumberdaya manusia, ilmu dan teknologi, organisasi dan manajemen, serta modal, kekayaan sosial ekonomi dan sosial budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang yang handal. Landasan hasil-hasil pembangunan pertanian yang sudah diletakkan oleh proses pembangunan sampai akhir PJP I adalah aset nasional yang secara fungsional dan struktural menjadi kekuatan nasional untuk membangun sistem agribisnis yang mewadahi perakitan berbagai perangkat kegiatan pembangunan pertanian dalam satuan-satuan kelembagaan pelaku ekonomi yang handal.

Peluang dari segi permintaan timbul di samping karena dinamika pertumbuhan penduduk, juga karena dinamika pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan arus globalisasi. Penduduk yang bertambah, pertumbuhan perkotaan, industrialisasi, peningkatan pendapatan, peningkatan kecerdasan/pendidikan, dan lain-lainnya, merupakan perubahan lingkungan strategik dari sisi permintaan yang manakala diantisipasi dan diapresiasi secara tepat akan menjadi peluang usaha agribisnis yang menjanjikan nilai tambah. Dari segi penawaran, peluang tersebut terbuka karena kemampuan ekonomi pedesaan yang semakin besar dan semakin terbuka sebagai hasil dari perubahan dan kemajuannya dalam transformasi struktural pertanian tradisional menjadi pertanian dan pedesaan maju. Berkat pengalaman dan pelajaran yang diraih dalam proses pembangunan dan modernisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan, ekonomi pedesaan sudah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi nasional. Proses perubahan untuk menjawab kebutuhan pangan nasional tersebut telah mengembangkan kelembagaan sistem agribisnis di pedesaan, yaitu perangkat yang menjadi



penghantar masukan iptek sarana, dana dan jasa, serta industri pengolahan hasil secara meluas di seluruh pedesaan.

Tantangan dan peluang serta kondisi sumberdaya pertanian yang merupakan kekayaan sumberdaya potensial dalam menapak era pembangunan PJP II dan yang dilengkapi dengan kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi ke pedesaan, menempatkan pembangunan pertanian pada posisi sebagai arena pembangunan ekonomi yang perlu melakukan penyesuaian dalam pendekatan, yaitu dari orientasi usahatani untuk mencukupi kebutuhan menjadi pendekatan agribisnis untuk meraih nilai tambah bagi wilayah pedesaan melalui kemampuannya untuk bersaing guna mencapai kesejahteraan yang adil dan merata.

Strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis merupakan upaya sistemik yang dipandang ampuh dalam mencapai beberapa tujuan ganda, antara lain (1) menarik dan mendorong sektor pertanian, (2) menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien dan fleksibel, (3) menciptakan nilai tambah, (4) meningkatkan penerimaan devisa, (5) menciptakan lapangan kerja, dan (6) memperbaiki pembagian pendapatan.

Dengan sistem agribisnis sebagai perangkat penggerak pembangunan pertanian, pertanian akan dapat memainkan peranan positif dalam pembangunan nasional, baik dalam pertumbuhan, pemerataan maupun stabilisasi. Adalah wajar apabila ternyata masyarakat pembangunan selalu dihadapkan dengan kenyataan bahwa sasarannya selalu meningkat di satu pihak, sementara kendalanya ternyata mengikat di pihak lainnya. Pencapaian semua tujuan dan sasaran yang menjadi harapan tersebut akan sangat tergantung kepada kehandalan dari sistem agribisnis/agroindustri yang dikembangkan.

Beberapa faktor strategik yang terkait dengan kehandalan tatanan agribisnis/-agroindustri yang dikembangkan itu adalah (1) lingkungan strategik; (2) permintaan; (3) sumberdaya, serta (4) ilmu dan teknologi.



1. *Lingkungan Strategik*

Dasawarsa terakhir ini ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan mendasar pada struktur ekonomi dunia. Keadaan perekonomian serta pola perdagangan dan industri internasional saat ini diwarnai arus globalisasi, dalam bentuk tumbuh dan berkembangnya blok-blok kerjasama regional dan menyatunya wawasan dan kekuatan ekonomi besar. Contoh yang sangat tampak antara lain MEE (pasar tunggal Eropa) atau *European Economic Community*, Pasaran bersama Amerika Utara atau *North America Free Trade* (NAFTA), perkembangan kegiatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik atau *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) serta berbagai kebangkitan ekonomi di wilayah Eropa Timur. Bahkan terealisasinya "korporasi" antara Indonesia-Malaysia-Singapura dalam *Triangle Growth* serta AFTA (*Asean Free Trade Area*) merupakan indikasi perubahan struktur tersebut.

Pengaruh globalisasi dengan sangat cepat menyusup pada struktur dan strategi badan-badan usaha multinasional (TNE = *Trans National Enterprises*). Persaingan antar industri telah berubah dengan munculnya kerjasama antara badan-badan usaha yang selama ini saling bersaing, untuk mencapai tingkat keuntungan ekonomi yang tinggi. Dampak daripadanya seringkali sulit untuk diantisipasi karena pengaruhnya dapat saja melanggar kaidah-kaidah ekonomi yang fundamental. Gambaran tersebut sesungguhnya menunjukkan betapa teori keunggulan komparatif tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia dewasa ini.

Jelas bahwa cepatnya fenomena globalisasi ekonomi tersebut membawa dampak yang sulit, baik untuk negara-negara industri maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Keadaan di atas seringkali lebih dipersulit dengan semakin tampaknya sifat proteksionistis negara-negara maju dalam perdagangan, persaingan tidak sehat antara sesama TNE dalam upaya melestarikan kegiatan ekonominya, (misalnya dengan strategi subsidi silang) dan lain sebagainya. Di pihak lain, seringkali tuntutan keseimbangan neraca perdagangan antar negara mengakibatkan bentuk perdagangan menjadi semakin tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip keunggulan komparatifnya, karena hubungan bilateral menjadi prinsip utama dibandingkan prinsip persaingan. Dengan demikian menjadi semakin penting bagi kita untuk menanamkan wawasan "*competitiveness*" sebagai landasan pembangunan pertanian.

2. *Permintaan*

Bagi dunia pertanian, dampak globalisasi ekonomi akan segera terlihat pada sektor-sektor produksi dari berbagai komoditas pertanian. Jika kita ingin terus meningkatkan kemampuan bersaing komoditas pertanian kita di pasar internasional, maka mau tidak mau kita harus mampu menangkap setiap gejala ataupun pergerakan yang terjadi pada pasar internasional tersebut. Jelas bahwa kecenderungan peningkatan produksi komoditas primer di satu pihak, yang disertai lambannya pertumbuhan permintaan, telah menimbulkan kelebihan penawaran yang pada gilirannya akan semakin menajamkan persaingan antar sesama negara produsen. Sementara itu negara-negara konsumen menjadi semakin sadar akan kepentingannya dalam menghadapi negara produsen, sehingga sistem produksi pertanian harus senantiasa dikelola dengan berorientasi pada permintaan pasar.

Perubahan perilaku dan selera pasar yang semakin cepat sangat sulit untuk diantisipasi dengan tepat oleh negara-negara produsen. Teknologi industri yang semakin canggih semakin menuntut keefisienan ekonomi, kehandalan kualitas, disiplin serta profesionalisme dengan segala etika yang terkait dengannya.

Terdesaknya sistem ekonomi komoditas primer, dengan kekuatannya yang rapuh menghadapi ketidakpastian pasar, menimbulkan kebutuhan terbinanya keterkaitan dan kerjasama dengan industri hilir, untuk mengusahakan tercapainya posisi penawaran di pasar internasional yang kuat. Hal ini antara lain bisa diusahakan melalui upaya-upaya diversifikasi. Kelemahan posisi itu terkait dengan komposisi ekspor hasil pertanian yang bersifat bahan baku yang mudah rusak, "*bulky*" serta sangat tergantung pada iklim dan musim. Kondisi ini menimbulkan instabilitas harga dari komoditas hasil pertanian yang mempunyai implikasi sulitnya meningkatkan nilai tambah serta daya saing, dan pada gilirannya akan berimbas pula pada pendapatan dan kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan.

Untuk dapat menjabarkan implikasi operasional dalam tindakan pembangunan yang tepat ditinjau dari watak permintaan pasar tersebut, diperlukan "*market intelligence*" dan "*market information*" sebagai perangkat lunak untuk meningkatkan daya saing dalam pemasaran atau perdagangan internasional, agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan segmentasi pasar, perubahan selera konsumen, pesaing potensial, dan lainnya.



3. *Sumberdaya*

Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumberdaya alam. Masalahnya adalah bagaimana mengelola, memanfaatkan secara optimal dan sekaligus memperluas "*resource base*" dari sumberdaya alam dimaksud, sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Secara hakiki, upaya pembangunan yang sedang ditempuh pada saat ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia di setiap wilayah maupun yang dapat diusahakan dari luar wilayah yang bersangkutan. Diantara sumberdaya potensial tersebut, ada yang berupa sumberdaya alam (*natural resources*), sumberdaya manusia (*human resources*) serta sumberdaya buatan (*man-made resources*).

Potensi sumberdaya alam yang cukup besar dan beragam dari tanah air Indonesia tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, perlu disadari bahwa pengelolaan sumberdaya potensial ("*potential endowment resources*") semacam itu mempunyai sifat khas, yaitu keterkaitan (*interdependency*) yang kompleks dan rumit, yang pada gilirannya berpengaruh kepada kelestarian (*sustainability*) sumberdaya tersebut.

Dengan demikian semakin jelas terlihat, bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya pembangunan selalu terkait pada persoalan-persoalan spesifik dari sumberdaya. Selain sifat langka dan uniknya, pertimbangan perlu diberikan kepada adanya masalah eksternalitas, tidak terbelahkan atau *indivisibility*, *public goods*, *property right*, serta kelangkaan spasial yang merupakan sumber dari monopoli alami atau *natural monopoly*.

Kesemua gambaran tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa potensi sumberdaya pertanian memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan prinsip-prinsip keunggulan kompetitif tanpa meninggalkan dua prinsip penting yaitu (a) wawasan agro-ekosistem dan (b) wawasan lokalita/wilayah/regional. Kedua wawasan tersebut pada dasarnya memberikan arah agar kegiatan agribisnis selalu memperhatikan kondisi dan potensi sumberdaya alam dan lingkungannya.



4. *Ilmu dan Teknologi*

Ilmu dan teknologi merupakan perangkat instrumental hasil karya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyanya, termasuk karya dalam menumbuhkan-kembangkan agribisnis di pedesaan. Peningkatan produktivitas dan efisiensi setiap simpul dalam rangkaian sistem agribisnis akan menghasilkan perbaikan dalam perolehan nilai tambah secara proporsional bagi setiap pelaku di dalam rangkaian sistem tersebut.

Sebagai hasil karya manusia, ilmu dan teknologi merupakan sumberdaya dinamik yang universal dan mempunyai mobilitas yang tinggi. Pengembangan, penyebaran, penerapan dan alih ilmu dan teknologi tentunya perlu diberi isi kearifan pertimbangan agar bersifat selektif dan tepat guna serta sesuai dengan nilai budaya bangsa. Penerapan iptek tersebut seyogyanya dilakukan sesuai keragaman dan karakteristik wilayah baik dari segi lahan, agroklimat maupun sosial ekonomi, sosial budaya serta tingkat kemampuan masyarakat setempat dalam mengadopsinya. Iptek juga berarti kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagai hasil daya cipta dan daya kreatif manusia. Disinilah relevansi peranan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk menumbuhkan budaya iptek yang bermuara pada tumbuhnya dinamika dalam menciptakan rakitan teknologi yang kompatibel dengan keunikan dari masing-masing wilayah. Berkembangnya iptek yang spesifik lokasi tersebut, pada gilirannya akan menghasilkan suatu pola pengembangan agribisnis yang dilandaskan pada keunggulan kompetitif wilayah, sebagai warna dan nuansa dari pengembangan agribisnis di Indonesia. Sarana pengembangan dan penyebaran serta adopsi iptek oleh sistem agribisnis tidak cukup hanya dengan eksistensi lembaga perguruan tinggi dengan litbang saja, tapi juga memerlukan hadirnya secara menyeluruh di pedesaan fasilitas belajar seperti adanya lembaga penyuluhan pertanian, sekolah-sekolah kejuruan, berbagai kursus ketrampilan, serta juga lembaga konsultasi yang tersebar dan bergerak melayani masyarakat petani/pedesaan.

Berbagai tantangan, peluang, lingkungan strategik, permintaan/penawaran, sumberdaya dan iptek, beserta iklim kondusif yang diciptakan oleh perangkat kebijakan dan pengaturan adalah komponen fungsional/struktural dari perangkat masyarakat ekonomi yang menjadi wadah dari proses transformasi pembentukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai komponen tentunya dia hanya akan berarti manakala berada

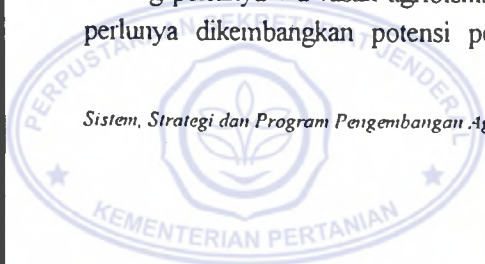


dalam tatanan tertentu yang memberinya posisi, aturan, daya, enersi, arah, takaran dan ukuran yang tepat, guna terwujudnya transformasi masukan menjadi luaran secara efisien dan menghasilkan nilai tambah yang optimal. Ini berarti dibutuhkan suatu sistem yang tepat agar pembangunan pertanian dapat menghantarkan pertanian kepada kondisi yang tangguh, maju dan efisien. Sistem itulah yang disebut sistem agribisnis.

III. WAWASAN DAN SISTEM AGRIBISNIS

Istilah agribisnis yang terungkap sejauh ini memberikan kesan kepada kita bahwa agribisnis adalah suatu corak pertanian tertentu dengan jati diri yang berbeda dengan pertanian tradisional (yang dilakoni mengikuti tradisi budidaya yang berakar pada adat istiadat dari komunitas tradisional) maupun dari pertanian hobi yang tidak mendambakan nilai tambah komersial. Agribisnis adalah pertanian yang organisasi dan manajemenya secara rasional dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diminta pasar. Oleh karena itu dalam agribisnis proses transformasi material yang diselenggarakannya tidak terbatas kepada budidaya proses biologik dari biota (tanaman, ternak, ikan) tapi juga proses pra usahatani, pasca panen, pengolahan dan niaga yang secara struktural diperlukan untuk memperkuat posisi adu tawar (*bargaining*) dalam interaksi dengan mitra transaksi di pasar. Ikatan keterkaitan fungsional dari kegiatan pra usahatani, budidaya, pasca panen, pengolahan, pengawetan dan pengendalian mutu serta niaga perlu terwadahi secara terpadu dalam suatu sistem agribisnis yang secara sinkron menjamin kinerja dari masing-masing satuan sub proses itu menjadi pemberi nilai tambah yang menguntungkan, baik bagi dirinya maupun bagi keseluruhan.

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang agribisnis sebagai sistem, perlu kita simak sepiantas tentang pengertian agribisnis sebagai wawasan. Wawasan adalah cara pandang yang mengandung persepsi jati diri dan perspektif waktu dan ruang gerak yang sekaligus juga mengandung konsepsi tentang norma, kondisi dan arah dari ruang gerak dan ruang hidup yang menjadi acuan. Apabila kita simak GBHN 1983, maka haluan yang digariskannya untuk melestarikan dan meningkatkan mutu swasembada pangan tidak ditekankan amanat normatif tentang perlunya wawasan agribisnis. Amanat ini justru ditekankannya ketika menegaskan perlunya dikembangkan potensi pertumbuhan baru, yaitu hortikultura, peternakan dan



perikanan dengan program yang berwawasan agribisnis. Wawasan swasembada dan wawasan agribisnis adalah dua wawasan yang sekaligus harus diamalkan dalam pembangunan pertanian dalam PJP II ini. Wawasan agribisnis adalah cara pandang terhadap pertanian sebagai lapangan usaha dan lapangan kerja yang menghasilkan barang dan jasa, untuk memenuhi permintaan pasar, dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah yang maksimal secara kompetitif. Dalam meraih nilai tambah tersebut, agribisnis memandang ruang gerak dan ruang hidupnya tidak terbatas kepada budidaya, tapi juga usaha pada penyediaan bahan, sarana, aslin dan jasa disektor hulu usahatani, serta pasca panen, pengolahan, penanganan hasil, pemasaran, dan lain-lainnya, di sektor hilirnya. Prinsipnya adalah lapangan usaha pada usahatani maupun sektor pendukung dan penunjangnya, baik yang di hulu maupun di hilir. Ditinjau dari sudut perilaku, wawasan agribisnis tersebut diharapkan menimbulkan sikap dan motivasi yang “pas” atau sesuai dari subyek pelaku pembangunan pertanian dalam menanggapi era industrialisasi dan globalisasi yang semakin gencar pada PJP II.

Sikap dan motivasi adalah kondisi mental dari perilaku individu dan masyarakat yang diperlukan bagi keberhasilan mencapai sesuatu tujuan. Walaupun demikian, kondisi mental yang baik saja tidak cukup, karena keberhasilan perilaku dalam upaya mencapai tujuan memerlukan perangkat instrumental lain yang harus dirakit secara serasi melalui suatu proses transformasi yang terukur dan terkendali. Pengertian agribisnis sebagai konsepsi untuk menanggapi tantangan dan peluang pembangunan pertanian dalam era globalisasi oleh karena itu tidak hanya berdimensi wawasan, karena agribisnis sebagai konsepsi pembangunan pertanian mempunyai dimensi asasi lain, yaitu sebagai sistem. **Sistem agribisnis** adalah perangkat masyarakat yang mewadahi proses transformasi pembentukan nilai tambah dari rangkaian kegiatan yang terkait di hulu dan hilir dari usahatani (budidaya). Dalam pengertian sistem, agribisnis adalah subyek (pelaku) sosial yang mandiri dalam arti mempunyai kemampuan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yaitu kemampuan untuk eksis, berkarya, berkembang, beradaptasi, berasosiasi, dan lainnya. Sebagai individu pelaku sosial sistem agribisnis mempunyai daur hidup : lahir, tumbuh, berkembang, berkarya, bermasyarakat, sakit, bahkan beranak dan mati. Sebagai individu dia lahir karena lingkungannya membutuhkan, yaitu ada tantangan, peluang dan masalah tertentu yang tidak dapat ditangani dengan sistem serta mekanisme yang ada. Kematangan kondisi lingkungan untuk lahirnya sistem agribisnis dewasa ini sudah tiba.



Kematangan kondisi lingkungan itu dinyatakan dengan beberapa indikator ekonomi pertanian yang relevan untuk disimak. Pasar dalam negeri dan ekspor hasil-hasil pertanian sejauh ini masih didominasi oleh produk-produk bahan mentah. Nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan agroindustri masih kecil, meskipun mempunyai peluang untuk dikembangkan, apabila hasil pertanian tersebut diekspor dalam bentuk hasil olahan. Peluang pengembangan industri olahan yang dapat lebih menjamin kepastian pasar, ternyata juga mempunyai hambatan. Adanya ketidakpastian pasok bahan baku merupakan masalah klasik yang sering menjadi kendala, disamping masalah mutu dan kekurangserasian dalam pola kemitraan dan kelembagaan yang sering menimbulkan biaya operasional tinggi.

Kematangan kondisi yang kondusif bagi perkembangan agribisnis tersebut juga ditunjang dengan landasan pengalaman pembangunan pertanian yang sejauh ini dilaksanakan, yaitu dalam sistem Bimas yang menjadi perangkat instrumental yang handal bagi tercapainya swasembada pangan. Istilah agribisnis itu sendiri sudah menjadi istilah yang berkembang pada dunia akademik sejak tahun delapan puluhan.

Secara konseptual sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani dan agroindustri, yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu (a) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian; (b) subsistem budidaya atau usahatani, (c) subsistem pengolahan hasil pertanian atau agroindustri, dan (d) subsistem pemasaran hasil pertanian, (e) subsistem prasarana, dan (f) subsistem pembinaan.

Subsistem penyediaan dan penyaluran sarana produksi mencakup semua kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk memungkinkan terlaksananya penerapan teknologi usahatani dan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal. Dengan demikian dalam subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini aspek-aspek yang ditangani tidak semata-mata menyangkut penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian, tetapi juga penyediaan informasi pertanian yang dibutuhkan petani, berbagai alternatif teknologi baru



penyediaan informasi pertanian yang dibutuhkan petani, berbagai alternatif teknologi baru yang kompatibel, pengerahan dan pengelolaan tenaga kerja dan sumber energi lainnya secara optimal, serta unsur-unsur pelancarnya.

Untuk mendorong terciptanya sistem agribisnis yang dinamis, khususnya guna menunjang terlaksananya kegiatan usahatani yang baik, maka pengembangan subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini, sebagaimana pada Bimas, diarahkan pada upaya penyediaan dan penyaluran berbagai sarana produksi yang dibutuhkan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan terjangkau oleh daya beli petani, yang disertai dengan penyediaan berbagai informasi dan paket teknologi secara kontinyu. Dalam kaitan ini, pengembangan prasarana dan institusi pedesaan yang memadai merupakan faktor yang sangat penting. Mengingat bahwa pengembangan prasarana dan institusi tersebut akan terkait erat dengan kegiatan sektor lainnya, maka koordinasi dengan sektor lain mutlak diperlukan.

Dalam subsistem usahatani, kegiatan yang ditangani mencakup pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, baik usahatani rakyat maupun usahatani berskala besar. Termasuk dalam kegiatan subsistem ini adalah perencanaan mengenai lokasi, komoditas, teknologi, pola usahatani dan skala usahanya untuk mencapai tingkat produksi yang optimal.

Dalam pada itu, subsistem pengolahan hasil atau agroindustri mencakup aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, serta mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen komoditas pertanian yang dihasilkan sampai pada tingkat pengolahan lanjut, selama pengolahan atau agroindustri tersebut berada di pedesaan.. Dengan demikian pemeraman, pengupasan, pembersihan, pengeringan, pengawaetan, pengekstrasian, penggilingan, pembekuan, dehidrasi, fermentasi peningkatan mutu dan pengepakan/ pengemasan masuk dalam lingkup sistem pengolahan hasil, sebagai komponen dari sistem agribisnis di pedesaan.

Sementara itu, subsistem pemasaran hasil kegiatan mencakup kegiatan distribusi dan pemasaran hasil-hasil usahatani ataupun hasil olahannya, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memungkinkan berkembangnya subsistem pemasaran hasil ini, maka berbagai kegiatan seperti pemantauan dan pengembangan informasi pasar (*market development, market promotion, dan market intelligence*) sangat penting untuk dilaksanakan.



Keempat subsistem di atas hanya menjalankan fungsi dan peranannya apabila berada dalam lingkungan yang menyediakan berbagai sarana dan fasilitas yang diperlukannya. Sumberdaya dan fasilitas yang harus tersedia dan siap pakai di lokalita sistem agribisnis itu, diantaranya ada yang bersifat prasarana publik yang keberadaannya harus ditangani oleh aparatur birokrasi pemerintahan. Prasarana jalan, perhubungan, pengairan, pengendalian, pengamanan dan konservasi menjadi syarat bagi lancarnya proses transformasi produktif yang diselenggarakan dunia usaha dan masyarakat pedesaan.

Selain prasarana, pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab dalam pembinaan iklim sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya yang kondusif dan dapat memperlancar bekerjanya dunia usaha dalam menggerakkan sistem perekonomian yang mengarah kepada terwujudnya sistem perekonomian yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan GBHN yang ditetapkan MPR. Iklim usaha, penyediaan kemudahan, pengaturan, iptek pembinaan SDM dan sumberdaya lainnya, sinkronisasi dan koordinasi, serta kepemimpinan sebagai motivator dan dinamisator masyarakat perlu hadir dan bekerja sampai meresap ke dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Demikianlah sistem agribisnis merupakan suatu rangkaian aktivitas yang saling berkaitan, yang keberhasilan pengembangannya akan sangat ditentukan oleh tingkat kehandalan dari setiap komponen yang menjadi subsistemnya. Untuk mencapai kehandalan yang simultan dari setiap subsistem dalam sistem agribisnis dibutuhkan ulur dan campur tangan pemerintah melalui regulasi, koordinasi, perlindungan, stimulasi, pelayanan dan penilaian terhadap seluruh subsistem dalam sistem agribisnis beserta lingkungan yang mempengaruhinya. Selain itu, kondisi sumberdaya, lingkungan dan prasarana juga merupakan faktor yang menentukan kehidupan dan perkembangan sistem agribisnis tersebut. Oleh karena itu sumberdaya lingkungan dan prasarana tersebut perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menunjang terlaksananya berbagai aktivitas dalam setiap subsistem secara memadai.

IV. STRUKTUR DAN TATALAKU MASYARAKAT AGRIBISNIS

Sejauh ini pembahasan tentang sistem agribisnis berlangsung pada tataran pemahaman sistem agribisnis sebagai individu atau satuan sistem agribisnis yang menjadi wadah transformasi peraih nilai tambah. Tetapi sebagaimana disinggung terdahulu, sistem agribisnis sebagai "*entity*" sosial yang hidup juga berasosiasi dan berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya. Jadi sistem agribisnis juga bermasyarakat dalam tatanan masyarakat yang berdimensi teritorial, fungsional dan profesional, serta regional dan global. Karena itu secara kontekstual pembahasan, pemahaman serta perekayasa yang terkait dengan sistem agribisnis perlu menampilkan dimensi pembahasan tentang struktur dan tatalaku masyarakat agribisnis. Hal ini perlu ditegaskan, karena sistem agribisnis sebagai "*entity*" secara individual tidak akan mampu membentuk lingkungan hidupnya yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Jadi pandangan, pemahaman dan pembahasan tentang agribisnis perlu didekati dari sudut pandang "mikro" maupun "makro".

Dari sudut pandang makro pada tataran masyarakat nasional, pengertian sistem agribisnis adalah fenomena dan citra dari sistem masyarakat yang secara agregatif tampil sebagai sektor ekonomi yang menghasilkan komoditas hasil pertanian/agroindustri. Dalam konteks pengertian sistem agribisnis, istilah sektor pertanian dapat menimbulkan kesalahpahaman. Sektor pertanian tidak menampung secara pas semua aspek sistem agribisnis. Sehubungan dengan itu, maka dalam sudut pandang makro sistem agribisnis nasional atau subnasional (wilayah) dapat disebut sebagai masyarakat agribisnis. Karena itu pendekatan serta perangkat analisa sistem agribisnis untuk tataran mikro tidak tepat untuk digunakan sebagai perangkat analisa dan rekayasa pada tataran makro (masyarakat agribisnis).

Apabila analisa pada tingkat mikro bertumpu kepada transformasi pembentukan barang/jasa dari dan untuk pasar melalui mekanisme komersial serta proses teknik tertentu, maka pada tingkat makro, kita mengamati proses transformasi masyarakat agribisnis tersebut bertumpu kepada proses sosial yang terkait dengan otoritas dari alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya dan dana untuk menjamin eksistensi, ketahanan dan keutuhan sistem masyarakat nasional. Karena itu aparaturnya masyarakat agribisnis nasional tersusun dari berbagai golongan fungsional yang terkait dengan berbagai kelembagaan yang berperan dalam penyediaan, alokasi, distribusi, pelayanan, penyesuaian dan pengendalian berbagai



sumber, daya, dana, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sistem agribisnis. Secara fungsional kita bisa memilah-milah warga masyarakat agribisnis atas 5 golongan, sebagai berikut: (1) **Pemerintahan** (2) **Dunia usaha** (3) **Masyarakat tani/pedesaan** (4) **Masyarakat ilmiah dan teknologi (pakar)** (5) **Masyarakat profesi**.

Masing-masing golongan tersebut terdiri dari berbagai unit organisasi/instansi pada tingkat nasional dan juga pada tingkat wilayah/daerah, yang kesemuanya mempunyai otoritas/kewenangan tertentu untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan sistem agribisnis yang tersebar di seluruh pelosok wilayah pedesaan. Maka mudah dimengerti bahwa yang sangat kritikal bagi kelancaran kehidupan agribisnis adalah adanya sinkronisasi dan koordinasi dari berbagai golongan warga masyarakat agribisnis tersebut. Karena itu diperlukan adanya kesatuan pengertian dan bahasa serta kesepakatan atas susunan dan mekanisme masyarakat dan sistem agribisnis tersebut.

Meskipun dinyatakan bahwa proses transformasi sistem masyarakat agribisnis itu pada dasarnya adalah proses oleh praja/olah otoritas (kekuasaan, kewenangan), tetapi tidak berarti bahwa mekanisme yang menjadi dasar penyampaian (*delivery*) dari luarannya ditempuh melalui jalur kekuasaan hierarkis. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa mekanisme paling efektif untuk menetapkan/menyampaikan keputusan-keputusannyapun adalah mekanisme pasar yang transparan dan kompetitif. Karena ada perbedaan dalam proses transformasi utamanya, maka integrasi antara sistem agribisnis di lokalita dengan masyarakat agribisnis (sebagai supra strukturnya) tidak dapat berlangsung melalui jalur spesialisasi vertikal, tapi tentunya harus bertumpu kepada suatu kerangka tata laku tertentu yang menjadi saluran proses konversi interaksi antara kedua tataran sistem itu. Adapun proses konversi yang menjadi tumpuan keterkaitan dari kedua tataran sistem agribisnis tersebut adalah daur hidup sistem badan usaha komersial, yaitu daur yang dimulai dari kondisi statik (pra kondisi), pra investasi, persiapan investasi, investasi, uji coba, operasi, komersialisasi, rehabilitasi, reinvestasi dan ekspansi. Selanjutnya tata laku tersebut dapat dibakukan dalam alur proses berikut: **Pra kondisi, Pra investasi, Investasi, Operasi, Pemantapan, Pengembangan dan Pendanaan**. Baik sistem agribisnis maupun masyarakat agribisnis berkarya dengan acuan daur tata laku investasi yang menjadi tolok ukur dari dinamika kehidupannya.

Berdasarkan latar belakang pengertian itu, maka konfigurasi tata laku sistem dan masyarakat agribisnis itu selanjutnya digambarkan secara skematis dalam matrik "**Struktur dan tata laku masyarakat agribisnis**" pada halaman 18.



STRUKTUR DAN TATA LAKU MASYARAKAT AGRIBISNIS

No.	MASYARAKAT AGRIBISNIS	SISTEM AGRIBISNIS						TATA LAKU
		MASUK-AN	USAHA TANI	PENGO-LAHAN	PEMA-SARAN	PRASA-RANA	PEMBI-NAAN	
I.	PEMERINTAHAN 1. DEPTAN 2. DEPHUT 3. DEPRIND 4. DEPERDAG 5. DEPTRANS 6. DEPKOP & PPK 7. DEP.PU 8. DEPHUB 9. DEPDAGRI 10. DEPKEU 11. DEPPARPOSTEL 12. DEPPEN 13. DEPNAKER 14. DEPTAMBEN 15. BAPPENAS 16. BPPT 17. BPN 18. BKPM 19. KLH/BAPEDAL 20. BPS 21. BULOG 22. PERBANKAN 23. PEMDA TK. I 24. PEMDA TK. II 25. PEM. DESA 26. LAIN-LAIN							A. PRAKONDISI B. PRAINVESTASI C. INVESTASI D. OPERASI E. PEMANTAPAN F. PENGEMBANGAN G. PENDANAAN PETUNJUK : Isikan huruf A, B, C, D, E, F dan G pada kolom sesuai dengan fungsi dan peranan dari masing- masing proponent masyarakat agribisnis
II.	PERTANIAN/PEDESAAN 1. KELUARGA TANI 2. KONTAK TANI 3. MIMBAR KTNA 4. WANITA TANI 5. PEMUDA TANI 6. LAIN-LAIN							
III.	DUNIA USAHA 1. KOPERASI 2. BUMN 3. SWASTA 4. KADIN 5. ASOSIASI 6. LAIN-LAIN							
IV.	PROFESI 1. HKTI 2. HNSI 3. LAIN-LAIN							
V.	PAKAR Berbagai organisasi pro- fesi ilmiah (PERHORTI, PERAGI, PERHEPI, PERHIPTANI, dll)							

Dengan citra kompleksitas keterkaitan yang luas tersebut, maka kehidupan masyarakat dan sistem agribisnis mempunyai hubungan saling ketergantungan yang luas dengan berbagai sektor ekonomi nasional maupun global. Dengan kata lain adanya perubahan pada salah satu simpul dalam sistemnya akan teresonansikan kepada simpul-simpul lainnya yang selanjutnya akan mendorong semua sektor yang terlibat di dalamnya. Implikasinya adalah sistem perencanaan yang sifatnya parsial tidak akan menjadi instrumen yang efektif di dalam mendorong pembangunan agribisnis. Perencanaan semacam ini mengabaikan kemungkinan munculnya **sinergi** dan **efisiensi** serta **masukan-masukan intelektual** yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan sistem agribisnis secara menyeluruh. Dalam hal ini, keterpaduan program dan koordinasi kegiatan program harus menjadi norma acuan dalam pengelolaan pembangunan nasional; khususnya di dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pembangunan agribisnis sebagai motor penggeraknya.

Kedayagunaan suatu program sangat bergantung kepada prosedur perumusan dan perencanaan program tersebut, program pembangunan agribisnis dirancang untuk mengangkat dan memformulasikan berbagai masalah kritikal di tingkat lokalita. Sehubungan dengan itu, maka prosedur perencanaan "*bottom up*" dilaksanakan untuk mewarnai praktek perencanaan pembangunan nasional yang berorientasi ke pedesaan. Sejalan dengan itu, maka strategi pengembangan agribisnis di pedesaan menitikberatkan orientasinya pada pengembangan agribisnis spesifik lokalita, sebagai manifestasi dari strategi dan kebijaksanaannya yang senantiasa mempertimbangkan keragaman wilayah, baik dalam aspek ekosistem, struktur ekonomi maupun sosial dan budaya. Dengan bertolak dari apa yang sudah ada dan berkembang di masing-masing lokalita, ditambah dengan penyempurnaan dan pendalaman organisasi dan manajemennya, secara berangsur-angsur dapat tumbuh sistem agribisnis yang efisien dan mampu bersaing berkat adanya skala usaha yang lebih sesuai dengan kebutuhan sistem ekonomi pasar. Instrumen kunci bagi realisasi perubahan orientasi tersebut adalah adanya **rancang bangun** dan **rekayasa arsitektur agribisnis**. Dengan sarana instrumental ini ini, maka pembangunan ekonomi pedesaan dengan wahana agribisnis diharapkan mampu merubah karakteristik pola usahatani yang subsisten menjadi usahatani komersial yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, yang ditunjang oleh semua sektor yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pola tata laku yang saling menunjang satu dengan yang lainnya.

V. STRATEGI PEMBANGUNAN AGRIBISNIS

Upaya untuk mewujudkan secara material sesuatu wawasan dalam dunia nyata dengan wujud eksistensi suatu sistem adalah suatu karya kemasyarakatan yang kompleks. Meskipun demikian, karena setiap upaya manusia untuk mencapai atau mewujudkan sesuatu tujuan (nilai, idaman, rencana) yang menyangkut kerjasama dan pemanfaatan sumberdaya serta lingkungan hidup harus berlangsung melalui suatu proses tertentu yang terpola dan melembaga, maka pengembangan agribisnis itu harus diusahakan supaya berlangsung melalui proses tertentu yang dirancang dan direkayasa secara sadar untuk menjamin keberhasilannya dengan efektif dan efisien. Proses tersebut adalah proses manajemen, dalam hal ini proses manajemen dari masyarakat agribisnis agar membentuk (melahirkan), menumbuhkan, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan sistem agribisnis sesuai dengan potensi dan karakteristik lingkungan hidupnya setempat. Proses itulah yang dimaksud dengan pengembangan agribisnis. Dengan perkataan lain pengembangan agribisnis adalah manajemen masyarakat agribisnis agar diperkaya dengan berbagai sistem agribisnis yang mampu memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia secara efisien dan kompetitif.

Sebagai proses yang bertumpu kepada keputusan, dan pengambilan keputusan yang teratur dan sistemik selalu bertolak dari paradigma yang menjadi acuan dan rujukan bagi utuhnya persepsi kesatuan dan persatuan dari jati dirinya, maka pengembangan agribisnis perlu dilandasi dengan paradigma acuan agar proses manajemen operasional yang dikembangkan pada setiap komponen sistemnya (subsistemnya) dapat berlangsung secara serasi, dimanapun atau kapanpun sistem ini berada. Paradigma tersebut tidak lain daripada pola pikir dan garis-garis besar konsepsi yang menjadi landasan dalam menyusun piranti, rencana dan program, yang secara konsisten dan berkelanjutan menghasilkan substansi yang secara akumulatif membentuk sesuatu wujud yang menjadi tujuan. Landasan yang menjadi acuan dasar dari keputusan manajemen itulah yang disebut strategi. Ketepatan sesuatu strategi akan menentukan keberhasilan suatu karya manajemen.

Bertolak dari kenyataan kompleksnya masyarakat agribisnis, yang kondisinya pada sesuatu waktu ditentukan oleh pengalaman sejarahnya, maka rumusan strategi pengembangan agribisnis PJPII tentunya berlandaskan kepada apa yang sudah diletakkan dan dibangun dalam PJP I. Strategi yang telah berhasil mengantarkan keberhasilan pembangunan pertanian



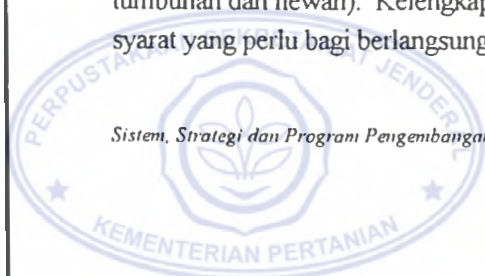
(rakyat) selama ini adalah strategi kesemestaan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dengan transformasi pertanian/pedesaan menjadi bagian integral dari sistem nasional yang dinamik. Dalam konsep strategi tersebut dikembangkan empat usaha pokok (intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi), yang penyelenggaraannya ditopang sistem paket program terpadu, seperti paket Bimas dan PIR. Melalui strategi tersebut terwujud kondisi pertanian/pedesaan dewasa ini, yang secara struktural sudah terjangkau oleh berbagai lembaga ekonomi nasional (catur sarana pedesaan) yang diperlukan untuk meningkatkan produksi/produktifitas.

Untuk PJP II strategi di atas dipandang tidak lagi memadai, karena yang diperlukan adalah tercapainya nilai tambah dan kemampuan bersaing dalam alam pasar terbuka dan globalisasi. Oleh karenanya, diperlukan penyesuaian-penyesuaian strategi, yaitu terutama dengan meningkatkan kehandalan kelembagaan sektor hilir dari usahatani, karena disinilah letak kelemahan pertanian dalam meraih nilai tambah yang maksimal. Strategi baru ini tetap bertolak dari kesemestaan agar pertanian yang sudah mengalami perubahan posisi (transformasi) tersebut dapat terus mengembangkan proses restrukturisasi pedesaan, sehingga di pedesaanpun terdapat keseimbangan sektor ekonomi dari pertanian, industri dan jasa. Dengan strategi ini maka wawasan dan sistem agribisnis akan memperoleh lingkungan strategik yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Kesemuanya itu memperlihatkan adanya perubahan strategi, yaitu dari strategi transformasi pada PJP I menjadi strategi restrukturisasi pada PJP II.

Untuk terciptanya kondisi lingkungan strategik pengembangan agribisnis yang kondusif dalam rangka strategi restrukturisasi pedesaan itu, perlu dikembangkan empat pilar penopang sistem agribisnis, sebagai berikut :

1. Eksistensi Senua Komponen Sistem Agribisnis secara Lengkap di Pedesaan

Sistem agribisnis adalah rakitan dari enam subsistem menjadi satu kesatuan rangkaian proses transformasi tekno-ekonomi (budidaya, pengolahan, niaga) untuk menghasilkan dan memasarkan barang/jasa yang bersumber kepada proses biologik dari biota (tumbuh-tumbuhan dan hewan). Kelengkapan eksistensi keenam subsistem di lokalita pedesaan adalah syarat yang perlu bagi berlangsungnya kehidupan agribisnis.



Keenam subsistem yang secara lengkap hadir di lokalita pedesaan tersebut membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya sistem agribisnis agar mampu meraih posisi adu tawar yang baik sehingga dapat meraih nilai tambah yang maksimal. Kondisi tersebut membuat pelaku sistem agribisnis terlengkapi perangkat fungsional untuk memanfaatkan sumberdaya secara rasional, efektif dan efisien dan untuk menjadi pelaku niaga yang berjati diri di pasar.

Kondisi di atas juga diperlukan bagi berkembangnya mekanisme hubungan melembaga yang memberikan kepastian adanya keserasian dan kelancaran arus kerja pada setiap simpul kaitan dari satu subsistem dan subsistem lainnya. Adanya kejelasan tanggungjawab, resiko dan insentif dari setiap simpul kaitan antar subsistem dalam kerangka sektor alur arus kerja sistem agribisnis keseluruhan hanya bisa dikembangkan bila keenam subsistem benar-benar ada dan bekerja di lokalita sistem agribisnis.

2. *Wirausaha dan Kemitraan Usaha*

Keenam komponen subsistem lengkap ada di lokalita adalah syarat yang perlu tapi belum cukup. Untuk mencukupi persyaratan keberadaan sistem agribisnis di pedesaan diperlukan kehadiran wirausaha (*entrepreneur*). Wirausahalah yang menjadi pemrakarsa, perintis, perakit, perekayasa, penggerak dan pemandu proses bekerjanya sistem agribisnis pada lokalita tertentu, sehingga sistem agribisnis tersebut tampil sebagai pelaku ekonomi dalam lingkungannya. Di tangan wirausahawanlah berlangsungnya proses perakitan dan perekayasaan untuk memanfaatkan keberadaan enam subsistem tersebut menjadi satu satuan perangkat sistem agribisnis yang mempunyai jati diri dan dinamika yang diperlukan dalam usahanya untuk meraih nilai tambah yang maksimal dan memiliki daya saing yang tangguh.

Mengingat pada setiap subsistem dalam sistem agribisnis juga ada wirausaha dan/atau wirakarya, maka pada setiap sistem agribisnis akan bekerja sejumlah wirausaha dan/atau wirakarya, yang tentunya harus mengembangkan mekanisme kerjasama melalui hubungan kemitraan dan manajerial yang dirancang, dirakit dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan optimasi bekerjanya sistem agribisnis yang didukungnya bersama. Melalui hubungan kemitraan yang disepakati bersama akan berkembang suatu sistem agribisnis yang mampu mendistribusikan insentif dan nilai tambah yang didapatnya secara proporsional menurut asas



keadilan yang menjadi tolok ukur normatif perekonomian Indonesia. Dengan hubungan kemitraan dan hubungan manajerial yang tepat akan terjamin dinamika dan keberlanjutan sistem agribisnis.

3. *Iklim Lingkungan yang Kondusif*

Selama ini berbagai kendala telah membatasi gairah masyarakat/dunia usaha untuk membangun sistem agribisnis, meskipun sebagian besar dari kendala struktural ekonomi dualistik sudah teratasi berkat strategi transformasi pedesaan yang berlangsung selama ini. Dari pilar strategi pertama dan kedua di atas tersirat betapa kompleksnya proses restrukturisasi ekonomi pedesaan agar mengamalkan wawasan dan sistem agribisnis. Apabila kendala pokok dari sisi hulu sudah bisa diterobos melalui penetrasi “*delivery system*” yang dibangun untuk keberhasilan program peningkatan produksi, maka di sisi hilir usahatani jalur “*delivery*” sampai kepada pemakai masih lemah, sementara itu arus investasi untuk agribisnis juga masih belum mendapatkan iklim dan fasilitas yang kondusif.

Hal-hal yang terkait dengan ketidakpastian karena kurang handalan “*delivery*” ke pasar dan arus investasi, seperti masalah standarisasi dan akreditasi, pengembangan dan informasi pasar, permodalan, perizinan, Amdal, serta hubungan industrial, kewirausahaan, dan hubungan manajerial perlu diatasi melalui sistem pelayanan, pengaturan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian yang ditangani secara sistemik, transparan dan dengan semangat debirokratisasi yang konsisten. Melalui pengembangan berbagai fasilitas yang terkait dengan penanggulangan kendala tersebut, diharapkan akan terbina iklim lingkungan agribisnis di pedesaan yang kondusif.

4. *Gerakan Nasional Pembangunan Agribisnis*

Masyarakat agribisnis nasional sebagai salah satu sistem dari masyarakat nasional yang mewadahi proses kehidupan supra struktur agribisnis nasional adalah wujud “*entity*” sistem sosial berskala nasional yang terbentuk karena dinamika interaksi berbagai golongan masyarakat yang secara simultan berkarya dalam penanganan rangkaian tata laku sistem agribisnis. Justru disinilah terletak kunci dari kelahiran sesuatu sistem yang besar. Dia sulit lahir dan tumbuh, karena kelahiran dan pertumbuhannya berlangsung melalui proses dinamik



gerakan simultan yang saling mengkait. Dalam dunia fisika kita mengenal apa yang disebut kelembaman massa. Sebagai agregasi masyarakat yang besar, masyarakat agribisnis juga mempunyai kelembaman massa yang menjadi kendala bagi gerakannya. Oleh karena itu diperlukan suatu momentum tertentu yang menjadi penggerak awal dari gerakan menyeluruh yang simultan. Maka diperlukan upaya untuk menciptakan dan mengembangkan momentum yang diperlukan untuk terjadinya gerakan simultan dalam ruang lingkup nasional dari berbagai golongan masyarakat yang bermuara pada terbentuknya masyarakat dan sistem agribisnis yang didambakan.

Dengan menggelar karya dan upaya yang bertumpu kepada keempat pilar strategi restrukturisasi pedesaan tersebut, pertumbuhan dan perkembangan agribisnis diharapkan terjadi secara alami, yaitu lahir, tumbuh dan berkembang sebagai respons kreatif terhadap kondisi lingkungan yang mengandung tantangan dan peluang pemanfaatan sumberdaya dari wilayah (lokalita) tertentu untuk menghasilkan sesuatu barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat (pasar, konsumen). Adanya kelengkapan lembaga sistem agribisnis di lokalita pedesaan, iklim dan fasilitas usaha yang kondusif, wirausaha/wirakarya dan sumberdaya manusia yang bersikap dan bermotivasi positif, ditambah berkemampuan dan berketrampilannya yang memadai; serta adanya momentum yang kuat sebagai dampak dari adanya gerakan nasional agribisnis; adalah kondisi dinamik yang mengandung medan gaya, titik dan daya tumbuh, serta embrio agribisnis yang akan segera lahir, bila ada pemrakarsa atau pemicu/pencetus yang membidani kelahirannya. Dalam banyak peristiwa peluang lahirnya embrio agribisnis itu tidak termanfaatkan dan hilang begitu saja, bukan karena tidak matangnya kondisi lingkungan, tetapi karena langkanya pemrakarsa yang menjadi pencetus dan pemicu lahir dan berkembangnya agribisnis pada lokalita tertentu.

Berhubungan dengan pentingnya faktor pemrakarsa atau tokoh pembangun sistem agribisnis pada lokalita wilayah agribisnis itu, maka keberhasilan pengelolaan program pembangunan pertanian berwawasan agribisnis akhirnya akan ditentukan oleh manusianya. Ini berarti bahwa diperlukan sesuatu model pengelolaan program yang berorientasi kepada upaya untuk memanfaatkan dan meningkatkan manusia sebagai pengambil keputusan. Selama ini model pengelolaan program yang dominan adalah model yang berorientasi kepada pengambilan keputusan sentralistik atau "*top down*". Padahal untuk mengembangkan sistem agribisnis yang spesifik lokalita, mutlak diperlukan adanya otonomi pengambilan keputusan



pada tingkat operasional yang langsung berhadapan dengan medan operasi. Dengan perkataan lain untuk terselenggaranya pembangunan pertanian berwawasan agribisnis diperlukan model pengambilan keputusan yang bersifat "*bottom up*". Dalam pada itu, agar kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dapat berkembang serta tumbuhnya kemampuan dalam menyusun rencana yang handal untuk membangun agribisnis yang sesuai dengan karakter lokalitanya, diperlukan adanya bantuan kaum cerdik pandai (para pakar) untuk memberikan pelayanan konsultasi agribisnis di pedesaan. Jadi apabila dalam PJP I diperlukan korps penyuluh pertanian, disamping korps peneliti dan korps pendidik, maka dalam PJP II diperlukan juga korps konsultan yang didukung berbagai spesialis secara terpadu.

Faktor kritikal lainnya yang menjadi pelancar utama dari pertumbuhan dan perkembangan agribisnis adalah faktor dana. Dalam hal dana inipun diperlukan suatu model pendanaan yang lebih terdesentralisasi; sehingga keputusan transaksi pembiayaan investasi atau modal kerja dapat dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya secara cepat dan tepat di tingkat daerah yang terdekat dengan lokalita agribisnis. Juga dalam proses pengambilan keputusan tentang pendanaan ini diperlukan suatu pola asistensi bantuan perencanaan dan persiapan proyek yang didukung oleh tim konsultan yang terpercaya oleh dunia perbankan. Dengan berlandaskan kepada acuan pola pikir strategi pengembangan yang dirumuskan di sini dan melakukan pengelolaan dengan menerapkan asas desentralisasi, program-program pengembangan agribisnis di tingkat lokalita dapat benar-benar diarahkan untuk mengembangkan usaha tani berkelanjutan, mendorong peningkatan investasi di bidang agribisnis, menumbuhkan serta menciptakan pasar bagi hasil primer serta hasil olahan, menciptakan struktur pemasaran yang efisien serta merekayasa kelembagaan yang tepat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di setiap lokalita.



VI. PERANGKAT PENUNJANG OPERASIONAL PEMBINAAN AGRIBISNIS

Beberapa aspek yang menjadi keperluan penting dalam menumbuhkan eksistensi sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian saat ini adalah :

Pembinaan Standardisasi dan Akreditasi

Era perdagangan bebas akan berdampak tumbuhnya persaingan yang semakin ketat bagi pemasaran komoditas pertanian khususnya di pasar internasional baik dari segi harga maupun mutu. Bagi konsumen di dalam negeri juga terlihat kecenderungan tuntutan persyaratan standar mutu yang lebih baik, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Produk hasil pertanian mempunyai sifat sangat mudah rusak (*perishable*), sehingga menuntut sistem penanganan, pengolahan, dan pengendalian mutu yang spesifik.

Untuk dapat bersaing di pasar yang bebas dan kompetitif saat ini, komoditas hasil pertanian yang dipasarkan harus benar-benar dapat menarik pembeli. Perlu ditanamkan kepada pelaku agribisnis sejak dari hulu bahwa produk yang dipasarkan memiliki kepastian mutu yang menjamin kesediaan pembeli/konsumen memberi harga yang lebih baik. Kepastian mutu ini hanya bisa didapat melalui penerapan standardisasi sejak proses produksi yang didukung oleh sistem akreditasi yang transparan. Dengan demikian, tujuan dari pengembangan dan pembinaan mutu tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek : (1) Meningkatkan efisiensi produksi, (2) Melindungi konsumen, (3) Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, (4) Menciptakan iklim usaha yang sehat, (5) Meningkatkan daya saing, (6) Melancarkan pemasaran, (7) Mendorong berkembangnya investasi dan (8) Ikut membantu fungsi pelestarian alam.

Pembinaan standardisasi dan akreditasi diperlukan guna menjamin adanya kepastian akan wujud dan mutu hasil-hasil pertanian sesuai dengan pasar. Pembinaan mutu dan standardisasi pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan pengembangan agribisnis khususnya dalam menghadapi persaingan ketat di pasar internasional. Dengan berhasilnya perundingan GATT dan munculnya blok-blok ekonomi seperti APEC, NAFTA,



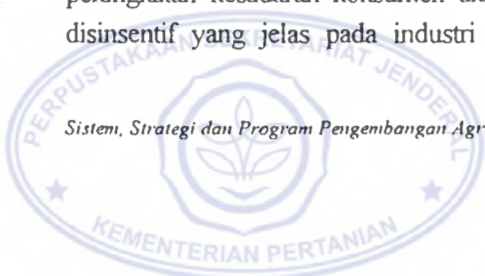
AFTA dan Pasar Bersama Eropa, maka kebutuhan akan standar mutu yang dapat diterima oleh konsumen baik dalam maupun luar negeri merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Pengembangan standardisasi dan akreditasi yang mendukung perbaikan kualitas akan dilaksanakan antara lain melalui :

- (1) Pembakuan standar dan sistemnya
- (2) Perbaikan sistem produksi (pra-panen)
- (3) Perbaikan sistem panen
- (4) Perbaikan sistem pasca panen, termasuk penanganan, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan yang mengacu pada prinsip-prinsip Good Manufacturing Practice dan Total Quality Control
- (5) Akreditasi laboratorium/lembaga penelitian
- (6) Pengawasan mutu yang dapat dilakukan melalui pengujian acak secara rutin oleh lembaga yang berwenang
- (7) Peningkatan kesadaran konsumen akan arti penting nilai kualitas
- (8) Pengembangan sistem insentif dan penalty yang jelas pada industri yang mematuhi atau melanggar ketentuan standar, termasuk ketentuan tentang pembuangan/pengendalian limbah yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam upaya memberikan jaminan mutu pada komoditas pertanian yang diperdagangkan ini, pemerintah melalui masing - masing instansi teknis terus melakukan pembinaan serta berupaya untuk menciptakan sistem standardisasi dan pembinaan mutu terpadu serta menyediakan perangkat yang diperlukan untuk penerapannya.

Pengembangan dan pembinaan mutu serta standardisasi yang merupakan syarat keharusan guna meningkatkan keberhasilan agribisnis dilaksanakan antara lain melalui : (a) pembakuan standar yang bersangkutan dengan agroindustri dan penerapan label yang menyebutkan bahan-bahan yang terkandung dalam produk ; (b) pengawasan kualitas yang dapat dilakukan melalui : pengujian acak secara rutin oleh lembaga-lembaga yang berwenang; peningkatan kesadaran konsumen akan nilai kualitas; pengembangan sistem insentif dan disinsentif yang jelas pada industri yang mematuhi atau melanggar ketentuan standar,



termasuk ketentuan tentang pembuangan limbah yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pengembangan dan Informasi Pasar

Melalui kebijaksanaan yang berkaitan dengan harga dapat diusahakan agar mekanisme pasar dapat mengarahkan alokasi sumberdaya dan meningkatkan keterkaitan antar subsistem dalam sistem agribisnis. Pemerintah sebagai fasilitator perlu memantau terus menerus perkembangan harga sarana produksi dan hasil-hasil pertanian, agar dapat memanfaatkan dinamika pasar untuk kepentingan nasional. Untuk komoditas tertentu pemerintah aktif memainkan peran di pasar, antara lain melalui pengelolaan cadangan penyangga stabilisasi harga pada tingkat yang layak. Kebijakan ini dapat juga dipakai dengan upaya percepatan laju penerapan paket teknologi maju untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Perbaikan sistem pemasaran diarahkan untuk terbentuknya mekanisme penentuan harga yang adil, yang pada gilirannya akan mengacu kepada pembagian keuntungan yang layak bagi produsen dan pelaku pemasaran. Kebijakan yang dilakukan untuk tujuan tersebut adalah (a) Meningkatkan posisi petani dalam proses pembentukan harga melalui pembinaan asosiasi produsen termasuk koperasi dan penyempurnaan pelayanan informasi pasar di semua tingkat pasar ; (b) Mendorong terciptanya struktur pasar yang lebih kompetitif dengan cara mengurangi terciptanya struktur pasar yang *monopolistik* ataupun *monopsonistik*; (c) Menciptakan pusat-pusat produksi berdasarkan asas skala ekonomi pada lokasi sehamparan dan mengaitkannya langsung dengan usaha agroindustri; (d) Menurunkan biaya pemasaran dengan mengupayakan terwujudnya prasarana pemasaran dan sarana transportasi umum yang lebih efisien dan mampu mencapai pusat-pusat produksi di pedesaan; (e) Menciptakan kemudahan dalam proses perjalanan alur komoditas dari produsen ke konsumen, termasuk merangsang tumbuhnya industri/fasilitas penyimpanan, pengemasan dan transportasi yang memadai; (f) pembatasan perdagangan yang bukan tarif dihilangkan secara bertahap dan tingkat tarifpun diperkecil.

Untuk meningkatkan cakupan daerah pemasaran, kebijaksanaan perluasan pasar hasil pertanian dan agroindustri diarahkan untuk: (a) Menyediakan fasilitas dan sarana promosi



yang dapat dilakukan perorangan ataupun asosiasi pengusaha; (b) Memperbaharui produk-produk lokal yang sudah diterima masyarakat maupun menciptakan produk baru yang mempunyai potensi pemasaran, (c) Memperluas dan mempermudah jaringan transportasi antar pulau dan antar negara, dan (d) Mengembangkan sistem penyidikan dan informasi pasar yang kuat baik untuk pasar domestik ataupun pasar internasional (*Market Intelligence* dan *Market Information*).

Pelayanan informasi dan promosi mencakup peluang pasar, harga, standar kualitas, teknologi, sistem perdagangan, mitra usaha di dalam dan di luar negeri serta informasi lain yang diperlukan para pelaku agribisnis telah disediakan oleh berbagai instansi secara terpisah. Untuk memudahkan para pengguna informasi yang terpisah-pisah tersebut akan dikoordinasikan dan disusun secara sistematis dalam suatu Sistem Informasi Pemasaran Pertanian. Lembaga ini juga dikembangkan sebagai sarana untuk peningkatan fasilitas promosi, di dalam dan di luar negeri.

Pengembangan Usaha dan Hubungan Kelembagaan

Agribisnis sebagai suatu sistem yang kompleks yang menyebar di pedesaan, yang proses adaptasinya terhadap tantangan globalisasi merenovasi perekayasaan organisasi usaha agribisnis yang handal dan kompetitif (melalui pengembangan sistem kerjasama kemitraan yang menjanjikan terwujudnya sistem produksi dalam skala optimal dan manajemen agribisnis yang menampilkan hubungan kemitraan yang harmonis), memerlukan kehadiran profesi perekayasa agribisnis di pedesaan, pengusaha yang berwawasan pejuang agribisnis dan petani yang tangguh.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut perlu dilakukan rekayasa kelembagaan pertanian pada tingkat desa sehingga diharapkan terjadi percepatan rekayasa kelembagaan pertanian dalam mengimbangi kecepatan tumbuh dan berkembangnya agroindustri, terutama dalam menangkap signal-signal pasar. Selain itu, kelembagaan pertanian dapat menyediakan bahan mentah dalam kuantitas, kualitas, kualifikasi dan waktu yang sesuai dengan permintaan pasar (agroindustri). Pada gilirannya, kelembagaan pertanian diharapkan akan dapat melakukan redistribusi manfaat ekonomi yang timbul sebagai akibat peningkatan efisiensi dan



peningkatan kaitan fungsional dengan agroindustri sehingga akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pengembangan sistem agribisnis terpadu dengan keterkaitan dan kemitraan usaha antara berbagai pelaku usaha merupakan bagian penting dari orientasi perencanaan kegiatan program pengembangan agribisnis. Selama ini telah berkembang hubungan kemitraan antara petani dengan pengusaha, antara lain dalam bentuk perusahaan pembimbing (PIR, Pengelola, Penghela), Sistem Bapak Angkat dan lain-lain bentuk hubungan kemitraan ekonomi.

Di tingkat pedesaan terdapat sejumlah lembaga informal seperti kelompok tani, taruna tani, dan wanita tani yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang efektif untuk berkomunikasi langsung dengan petani. Selama ini lembaga-lembaga tersebut sebagai sarana dalam rangka penerapan teknologi. Sejauh ini ternyata bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan berhasil membawa hasil kongkrit yang ditunjukkan oleh terus meningkatnya produksi komoditas pangan dan komoditas lainnya yang tentu saja disebabkan karena semakin meningkatnya kemampuan petani.

Dalam pengembangan pertanian masa datang, pengembangan lembaga-lembaga non formal tersebut perlu diarahkan pada pembentukan sistem agribisnis dalam rangka meningkatkan pembanguana pertanian terpadu. Secara khusus perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada taruna tani dan wanita tani terutama karena dua hal berikut. Pertama, masa depan pertanian berada ditangan kelompok taruna tani oleh karena itu pengembangan agribisnis untuk masa yang akan datang ditentukan oleh keterampilan bisnis mereka. Disamping itu, dengan keterampilan dan citra kerja serta produktivitas kerja yang semakin meningkat, kegiatan pertanian akan menjadi semakin menarik bagi mereka sehingga dengan sendirinya akan mengurangi hasrat untuk meninggalkan wilayah pedesaan untuk mencari kesempatan-kesempatan baru di daerah perkotaan. Kedua, kelompok wanita tani memainkan peranan yang besar di pedesaan tidak hanya dalam hal kerumah-tanggaan tetapi juga dalam agribisnis. Sebagian besar wanita tani di pedesaan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pertanian, bahkan di beberapa wilayah tertentu peranan wanita tani lebih dominan dibandingkan dengan peranan pria. Dengan demikian peningkatan wanita tani dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan dan selanjutnya akan



meningkatkan kesejahteraan keluarga tani. Berkaitan erat dengan hal ini kemampuan penyuluhan dalam bidang agribisnis perlu terus ditingkatkan.

Peningkatan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri terjadi berkat pengembangan agroindustri yang terpadu dalam sistem agribisnis. Dengan terjadinya peningkatan kaitan antara sektor pertanian dengan sub sektor agroindustri melalui integrasi fungsional, diharapkan tata nilai dan norma industri akan terdifusi ke kelembagaan pertanian.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut perlu dilakukan rekayasa kelembagaan pertanian pada tingkat desa sehingga diharapkan terjadi percepatan rekayasa kelembagaan pertanian dalam mengimbangi kecepatan tumbuh dan berkembangnya agroindustri, terutama dalam menangkap signal-signal pasar. Selain itu, kelembagaan pertanian dapat menyediakan bahan mentah dalam kuantitas, kualitas, kualifikasi dan waktu yang sesuai dengan permintaan pasar (agroindustri). Pada gilirannya, kelembagaan pertanian diharapkan akan dapat melakukan redistribusi manfaat ekonomi yang timbul sebagai akibat peningkatan efisiensi dan peningkatan kaitan fungsional dengan agroindustri.

Pengembangan Investasi dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Secara umum, kegiatan produktif yang dilakukan oleh petani maupun pengusaha pengolahan hasil-hasil pertanian tercakup dalam suatu sistem agribisnis, baik yang berskala kecil maupun besar. Petani maupun pengusaha di bidang pertanian tersebut adalah pemilik dan pengelola langsung sumberdaya pertanian. Investasi pemerintah tidak ditujukan untuk kegiatan produktif langsung, tetapi dilakukan di berbagai bidang dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi bertumbuhnya berbagai kegiatan usaha produktif di sektor pertanian, yang umumnya berbentuk fasilitas/parasarana publik. Hal ini dilakukan antara lain karena biaya investasinya yang cukup besar dan berada di luar jangkauan petani dan dunia usaha, atau kegiatan produktif tertentu sedemikian strategis sehingga memerlukan campur tangan pemerintah.

Pengembangan investasi di bidang sarana dan prasarana diharapkan akan mampu mendorong pengembangan agribisnis. Contoh kongkrit untuk hal ini adalah investasi di bidang perhubungan, transportasi, komunikasi, pusat-pusat pasar, fasilitas yang dapat meningkatkan efisiensi pemasaran, serta investasi di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pertanian. Iklim investasi disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan diversifikasi pertanian dan agribisnis di daerah serta keterkaitannya dengan upaya pengembangan wilayah secara terpadu. Dalam pada itu dengan tersedianya fasilitas-prasarana publik, ditambah dengan penciptaan iklim investasi kondusif, pihak dunia usaha/swasta terangsang untuk melakukan investasi baik dalam produksi, pengolahan maupun distribusi dan pemasaran. Kebijakan yang ditempuh untuk hal ini adalah pengaturan agar terjadi keseimbangan antara yang kecil dan yang besar, antar wilayah, dan antara koperasi, swasta dan BUMN, dengan jiwa saling menopang, saling mengisi, dan tidak dalam persaingan yang tidak sehat.

Kegiatan investasi baik yang bersumber dari modal asing maupun dalam negeri dalam kegiatan produktif sektor pertanian merupakan bagian dari upaya pembangunan pertanian yang tetap didorong secara intensif. Orientasi yang ditempuh adalah meneruskan upaya penyempurnaan dalam penyediaan berbagai kemudahan di bidang perijinan maupun dalam penyediaan prasarana.

Pembangunan pertanian dilaksanakan dengan pendekatan berwawasan lingkungan, artinya kegiatan pertanian disamping memanfaatkan sumberdaya tetapi juga sekaligus melestarikan dan kalau mungkin meningkatkan produktivitasnya. Bersamaan dengan itu upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat sampingan dari kegiatan pertanian terus diupayakan agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan kelestarian lingkungan hidup dapat dipertahankan. Berkaitan dengan itu, upaya-upaya yang berkaitan dengan memberikan insentif investasi bagi sektor swasta akan selalu dikaitkan dengan upaya-upaya melestarikan lingkungan.

Dengan demikian, orientasi pengembangan agribisnis tetap didudukkan pada kerangka pembangunan pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa orientasi investasi harus tetap berlandaskan pada wawasan agroekosistem.



VII. TATALAKSANA

Perencanaan dan Rancang Bangun

Pembangunan pertanian dengan pendekatan sistem agribisnis merupakan upaya untuk melanjutkan, memperluas dan memperdalam pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga terjadi percepatan dalam peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan para pelakunya (petani dan nelayan), yang pada akhirnya akan mampu memperkecil senjang kesejahteraan antara mereka yang bergerak di sektor pertanian dan non pertanian. Sesuai dengan sifat pertanian sebagai industri yang bertumpu pada proses biologis dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang berada di pedesaan, maka keberadaan sistem agribisnis secara asasi akan berada di pedesaan. Karena tempat berpijaknya di pedesaan, maka perencanaan pembangunan sistem agribisnis bertolak dari **kejelasan identitas lokalita pedesaan itu**.

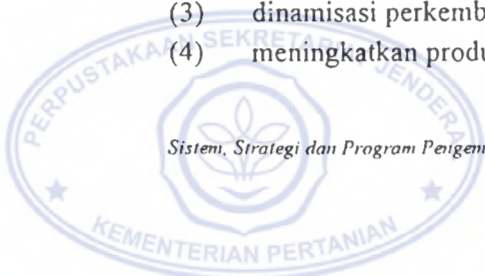
Bertolak dari dasar pemikiran tersebut, maka ditetapkan satuan kawasan Pengembangan Agribisnis terkecil yang sudah berfungsi dalam proses transformasi pertanian rakyat, yaitu **Wilayah Unit Desa (WILUD)**. Wilayah Unit Desa adalah konsep pewilayahan komoditi dengan pendekatan sistem agribisnis, sehingga WILUD dapat berperan sebagai satuan wilayah kerja agribisnis yang didalamnya hadir 6 (enam) unsur pokok "*delivering systems*" yaitu teknologi, sarana, dana, pengolahan/pemasaran, dan pembinaan, serta prasarana. Kawasan WILUD dirancang sedemikian rupa agar setiap petani atau kelompok tani dalam satuan wilayah tersebut dapat menjangkau pusat pengembangan WILUD tersebut dalam satu hari pergi pulang. Dalam PJP I unit seperti ini sudah berkembang di sebagian besar pedesaan dengan ekologi sawah melalui sistem BIMAS. Saat ini istilah Wilayah Unit Desa dari sistem Binas kita kenal sebagai Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP). Karakter spesifik dari WILUD dapat diidentifikasi lebih lanjut atas dasar basis ekologi yang dominan. Berdasarkan karakter tersebut dapat dirumuskan program dengan kandungan rangkaian kegiatan utama yang relevan dengan kebutuhan dari pengembangan agribisnis di lokalita itu. Basis ekologi dominan tersebut adalah:

- 1) **Ekologi sawah**, dengan komoditas utama padi.
- 2) **Ekologi lahan kering**, dengan komoditas utama yang tertentu pada setiap lokalita, umpamanya tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan lain-lain.
- 3) **Ekologi pantai**, dengan komoditas utama hasil laut/pantai.

Di dalam setiap basis ekologi tersebut komoditas yang potensial dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan yang diinginkan melalui apresiasi pemanfaatan sumberdaya wilayah dapat beraneka ragam. Dapat pula dikembangkan beragam kegiatan ekonomi, dari mulai pra-produksi sampai pada pengolahan/-distribusinya. Misalnya saja dalam ekologi sawah, selain mengusahakan padi juga diusahakan perikanan, peternakan, maupun tanaman lainnya sesuai dengan kecocokan ekologis dan kelayakan usahanya. Beranjak dari potensi diversifikasi tersebut, pembangunan sistem agribisnis untuk optimasi pemanfaatan sumberdaya yang mengacu kepada peningkatan pendapatan dapat dan bahkan perlu dikembangkan di semua wilayah pedesaan.

Lebih lanjut, dalam kaitan dengan diversifikasi vertikal dalam setiap WILUD seyogyanya hadir secara lengkap semua komponen rantai sistem agribisnis, termasuk industri pengolahan hasil pertanian atau agroindustri (terutama skala rumah tangga dan usaha skala kecil). Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimasi pemanfaatan sumberdaya, agroindustri skala menengah dan besar dapat pula dihadirkan di pedesaan. Selanjutnya, untuk memberikan jaminan ketersediaan bahan baku bagi keperluan agroindustri tersebut, beberapa WILUD bekerjasama dalam satu keterpaduan sistem agribisnis di wilayah yang lebih luas yaitu dalam Wilayah Komoditas (WILKOM). Dengan acuan pola pikir ini, maka dinamika pembangunan pertanian berwawasan agribisnis akan tampil sebagai pengusahaan berbagai komoditas dengan proses investasi sistem agribisnis spesifik lokalita yang mengacu kepada dinamika pasar, sehingga wilayah pedesaan mampu:

- (1) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
- (2) meningkatkan efisiensi usaha
- (3) dinamisasi perkembangan wilayah pedesaan, yang bermuara kepada
- (4) meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan masyarakat pedesaan.



Pembangunan adalah proses investasi, karena itu skenario pembangunan dan pengembangan agribisnis akan bertumpu kepada tata laku proses investasi. Dalam hubungan ini, perencanaan investasi sistem agribisnis merupakan satu peristiwa yang mutlak perlu diselenggarakan dengan seksama, agar proses pembentukan, pengoperasian dan pengembangan sistem agribisnis yang dibangun itu berlangsung menuju pencapaian tujuannya.

Proses pembangunan agribisnis dapat disimak dengan pola pikir tata laku daur kehidupan sistem agribisnis, ditinjau dari sudut pandang pembangunan perusahaan sebagai proses investasi. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab terdahulu tata laku investasi itu dapat disimak di lapangan (WILUD) dalam beragam status, yaitu pra kondisi, pra investasi, investasi/konstruksi, operasi, pemantapan, pengembangan dan pendanaan. Dalam menyimak status daur (investasi) keberadaan sistem agribisnis di suatu WILUD, perlu terlebih dahulu ditetapkan komoditas yang menjadi acuan dalam penilaian kondisi lapangan lokalita (WILUD) itu.

Sebagai contoh kita ambil lokalita (WILUD/WKPP) basis ekologi sawah dengan komoditas acuan padi. Suatu WILUD ekologi sawah berada dalam status pra kondisi, apabila wilayah itu belum terjangkau jaringan sistem ekonomi pasar, sehingga tidak mungkin investasi/pembangunan sistem agribisnis. Status pra investasi terbentuk apabila secara fisik wilayah itu terjangkau jaringan hubungan ekonomi dengan pusat-pusat pengembangan (pasar), tetapi secara sosial ekonomi belum siap untuk berpartisipasi dalam proses investasi. Umpamanya iptek tepat guna belum tersedia atau belum dikuasai oleh penduduk setempat, atau berbagai lembaga penghantar kebutuhan (catur sarana) belum berkembang. Status operasi usahatani di wilayah itu hanya mungkin dilakukan secara tradisional, tanpa terkait dengan arus dana. Apabila WILUD itu sudah melakukan intensifikasi maka status pemantapan sedang disandangnya. Bahkan apabila sudah beranjak kepada diversifikasi status pengembangan sudah diraihny, dimana investasi sistem agribisnis untuk cabang usaha diversifikasi sudah terjadi. Pengembangan adalah proses inovatif untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi wilayah dan sumberdaya yang ada.



Melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan yang baku ini secara garis besar diidentifikasi (a) garis/kondisi awal dari setiap lokalita (WILUD/WKPP), (b) tujuan dan sasaran spesifik lokalita, (c) rumusan rancang bangun (arsitektur) sistem agribisnis, dan (d) jenis dan kebutuhan investasi.

(a) Garis/kondisi awal

Dalam melakukan identifikasi garis/kondisi awal dari lokalita agribisnis, ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu :

- (1) Kondisi wilayah pada saat awal dan perkiraan serta perkembangannya, seandainya tidak dilakukan intervensi. Kondisi dan potensi sumberdaya yang perlu dikaji menyangkut ketersediaan, kualitas dan keragaman sumberdaya alam; keberadaan dan kualitas sumberdaya manusia; keberadaan dan efektivitas pemanfaatan pranata ekonomi, sosial dan kelembagaan yang berperan dalam pembangunan pedesaan.
- (2) Garis awal bagi pengembangan agribisnis. Tolok ukur yang dipergunakan untuk mengidentifikasi struktur garis awal dari perkembangan agribisnis adalah proses daur hidup suatu sistem usaha komersial, yang terdiri dari pra-kondisi, pra-investasi, konstruksi/investasi, operasi, pemantapan, pengembangan, dan pendanaan.

Daerah dengan potensi pemanfaatan sumberdaya yang rendah, karena prasarana dan sarana ekonomi terbatas serta derajat keterbukaan ekonomi yang masih rendah dapat dikategorikan berada dalam **status pra-kondisi**. Jika untuk wilayah tersebut sudah tersedia iptek untuk memanfaatkan potensinya, sehingga dapat segera dilakukan pengembangan SDM dan prasarananya, maka wilayah ini termasuk dalam **status pra-investasi**. **Status konstruksi/investasi** adalah tahap pelaksanaan konstruksi sistem agribisnis, baik investasi baru ataupun pengembangan sampai dengan operasi usaha agribisnis mengeluarkan hasil dan pendapatan. Pada tahap ini termasuk pula proses pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha. **status operasi** ditunjukkan oleh bekerjanya sistem agribisnis secara penuh pada saat mana sistem itu menampilkan karyanya untuk mewujudkan keterpaduan semua subsistemnya guna mencapai potensi teknis yang dimilikinya.



Suatu WILUD atau WILKOM dapat dikategorikan pada status **pemantapan** apabila sistem agribisnis bekerja untuk meningkatkan keserasian kinerja dan keterpaduan dari semua subsistemnya untuk mencapai optimasi dan efisiensi agar mencapai nilai tambah maksimal dengan memanfaatkan potensi teknis dan peluang pasar yang dimilikinya. Status pengembangan adalah pemanfaatan aset dan modal yang dimiliki untuk diversifikasi, perluasan, restrukturisasi, reinvestasi, dll.

Keenam posisi tata laku investasi itu, dalam iterasi berikutnya berulang dalam upaya untuk perluasan, pendalaman, dan kesinambungan pertumbuhan dengan tingkat yang diharapkan. Dalam proses investasi, arus dana merupakan parameter enersi pertumbuhan dari sistem agribisnis. Oleh karena itu maka pendanaan yang sifatnya berkesinambungan, merupakan indikator ketujuh dari daur investasi/usaha komersial di atas. Gambaran kondisi saat awal untuk setiap WILUD dan WILKOM akan beragam dan berada pada status daur investasi yang berbeda sesuai dengan kenyataan spesifikasi komoditi serta status dari potensi sumberdaya pembangunan dan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini.

Hasil identifikasi butir (1) perlu ditindaklanjuti dengan olah karsa untuk menentukan arah dan rancangan pengembangan agribisnis berikut upaya-upaya yang diperlukan bagi terwujudnya percepatan pertumbuhan agribisnis di lokalita tersebut sesuai dengan yang diharapkan penduduknya. Sementara itu, hasil identifikasi butir (2) menghasilkan inventarisasi dan klasifikasi WILUD/ WILKOM yang menjadi sarana bagi perumusan perangkat program intervensi untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan.

(b) Tujuan dan sasaran spesifik lokalita

Dinamika pembangunan ekonomi menghadapkan sektor pertanian kepada kebutuhan akan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan seraya mempersempit kesenjangan pendapatan dengan sektor ekonomi lainnya. Karena itu misi pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis adalah meningkatkan



pendapatan petani secara terus menerus dengan optimasi penggunaan sumberdaya yang dimilikinya.

Tujuan/sasaran itu perlu diterjemahkan secara kuantitatif. Seperti halnya dengan tujuan/sasaran, maka garis awal pengembangan agribisnis juga perlu dijabarkan secara kuantitatif agar dapat diperbandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Selisih antara sasaran yang ingin dicapai dan kondisi objektif saat awal merupakan tantangan untuk lahirnya berbagai kreasi dan inovasi yang akan bermuara kepada investasi yang dirancang untuk membangun sistem agribisnis yang tepat bagi WILUD/WILKOM itu. Melalui pembangunan sistem agribisnis itu, maka berbagai sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan dapat dikelola secara terencana dengan mempertimbangkan kendala yang ada di lapangan.

(c) Rumusan Rancang Bangun (Arsitektur) Sistem Agribisnis

Langkah berikutnya dalam perencanaan pengembangan agribisnis pedesaan adalah perumusan arsitektur dan perencanaan pembangunan sistem agribisnis yang merujuk kepada kondisi dan potensi lokalita sistem agribisnis tersebut. Perumusan arsitektur, rencana dan kegiatan untuk pengembangan sistem agribisnis di WILUD/WILKOM itu mencakup keseluruhan komponen struktural sistem agribisnis, jadi tidak terbatas kepada komponen kegiatan yang menjadi yurisdiksi atau kewenangan Departemen Pertanian saja, tetapi mencakup kegiatan lintas sektoral yang terkait dengan terselenggaranya sistem agribisnis itu. Dalam kaitan ini penjabaran rinci dari berbagai unsur dilakukan dengan mengacu pada matriks tata laku daur proses investasi sistem agribisnis sebagai kegiatan dari para pelaku masyarakat agribisnis. Masing-masing pelaku agribisnis seperti pemerintahan, dunia usaha, petani, pakar, dan profesi berpartisipasi/turut ambil bagian secara aktif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(d) Jenis dan kebutuhan investasi

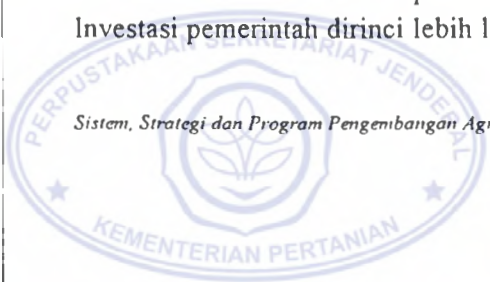
Proses perencanaan berikutnya berupa identifikasi jenis investasi serta rencana kebutuhan dananya. Bertolak dari sistem agribisnis terpadu yang utuh, maka upaya untuk menggerakkan investasi dapat berlangsung melalui berbagai pola



pengembangan investasi yang spesifik lokalita dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan sistem agribisnis, seperti sifat usahatani, sumber daya manusia, skala usaha, lokalita, sarana, prasarana, keterkaitan antar subsistem, ilmu dan teknologi, orientasi usaha, aparaturnya masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sesuai dengan hasil identifikasi garis awal, jenis dan kebutuhan investasi akan bergantung pada tahap daur hidup usaha komersial yang berlaku pada suatu wilayah, seperti yang disebutkan di atas. Misalnya dalam tahap prakondisi dan prainvestasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan analisa peluang, identifikasi, perancangan, pengkajian kelayakan serta persiapan berbagai kondisi perlu dilakukan. Selanjutnya dalam pra investasi juga akan diperlukan persiapan, pengadaan dan penciptaan struktur, sarana dan prasarana yang akan melibatkan berbagai pihak. Dalam pelaksanaan investasi diperlukan pengelolaan berbagai sumberdaya, sumber dana, jasa dan lembaga yang harus tersedia dan bekerja di lokalita. Demikian juga setelah tahap investasi akan diperlukan beroperasinya berbagai institusi dalam keterkaitan operasional yang akan tumbuh dan berlangsung sebagai suatu proses belajar.

Karena proses investasi merupakan karya kompleks dari berbagai institusi (baik komersial maupun non komersial), yang bertumpu kepada lahirnya gagasan usaha baru (inovasi) serta berpangkal kepada "*intellectual input*", maka upaya untuk merangsang investasi agribisnis dan memperkirakan jenis serta kebutuhan investasi agribisnis yang perlu dilakukan dengan akurat itu memerlukan kehadiran pemberi jasa perencana arsitektur agribisnis di pedesaan. Profesi jasa arsitektur dan manajemen agribisnis itu disamping dibutuhkan dalam proses identifikasi dan perencanaan sistem agribisnis, juga diperlukan untuk mendampingi masyarakat agribisnis setempat dalam mengelola sistem agribisnis yang ada di wilayahnya.

Rancangan umum sistem agribisnis spesifik lokalita hasil karya kelompok pemberi jasa perencana itu, merupakan dokumen "Rencana Induk" proyek pembangunan sistem agribisnis yang dihasilkan oleh proses perencanaan dari bawah (*bottom up planning*). Ini akan menjadi rujukan bagi penjabaran rencana investasi yang lebih rinci. Dengan merujuk kepada Rencana Induk ini dapat diperkirakan kebutuhan investasi dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat setempat. Investasi pemerintah dirinci lebih lanjut inenurut kewenangan masing-masing instansi



dalam penganggarannya. Misalnya untuk pembangunan prasarana fisik ada pada Departemen Pekerjaan Umum, untuk pembinaan usaha tani dan komoditas ada pada Departemen Pertanian, dan untuk pembinaan agroindustri ada pada Departemen Perindustrian. Demikian pula rincian rencana investasi koperasi, BUMN, dan swasta dapat direncanakan apakah dibiayai dengan dana sendiri, kredit, pasar modal, atau kombinasi diantaranya.

Penjabaran rinci rencana kegiatan dari badan-badan atau instansi yang berpangkalan di luar pedesaan (pemerintah, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi ilmuwan) yang merujuk kepada **"Rencana Induk"** sistem agribisnis spesifik lokalita itu, seyogyanya merupakan penjabaran dari program-program pembangunan yang "diturunkan" dari induk organisasinya masing-masing. Dengan demikian tidak akan terjadi benturan kepentingan dari "Arus Atas" dan "Arus Bawah", karena keduanya bertaut menjadi satu dalam wadah sistem agribisnis lokalita yang menjadi milik masyarakat agribisnis dan sekaligus masyarakat pedesaan. Jadi **"Rencana Induk Sistem Agribisnis Lokalita (WILUD)"** adalah wadah bertautnya program yang dibawa dari "Atas" (luar pedesaan) dengan aspirasi, peluang, potensi, kemampuan dan sumber daya yang terkait dalam proses perencanaan dari "Bawah" seperti diuraikan di bahagian terdahulu.

Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa berbagai program yang turun dari "Atas" itu hadir di pedesaan sebagai Pembimbing, yaitu fungsi yang terkait dengan kehadiran peluang, perangsang, stimulasi, penggerak, penunjang, penyedia fasilitas, pengelola prasarana, pengelola "iklim", pengarah, pemandu, pendamping/fasilitator, dan lain sebagainya. Sedangkan para penyelenggara (usahawan) sistem agribisnis adalah pelaku utamanya, merekalah yang meraih dan memanfaatkan segala peluang dan program serta fasilitas yang tersedia untuk menunjang keberhasilan usahanya. Dengan tertautnya program dari atas yang bersifat umum dan terbuka dengan prakarsa masyarakat pedesaan untuk membangun sistem agribisnis yang spesifik (komoditi, lokalita, peserta, organisasi serta skala usahanya), akan tergelar proses pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis yang ditetapkan sebagai acuan normatif nasional oleh GBHN 1993.



Bimbingan

Apabila kembali menyimak esensi dari strategi restrukturisasi pedesaan dengan empat pilar penyangga agribisnis, dan kita bandingkan dengan pengalaman kita dengan strategi transformasi, revitalisasi dan peningkatan produksi pada PJP I, terlihat bahwa meskipun belum simultan keempat pilar strategik tersebut sudah turut mewarnai proses pembangunan berencana yang kita selenggarakan. Yang paling dekat dan paling cocok untuk jadi landasan konsepsional dari strategi restrukturisasi adalah strategi transformasi yang dikembangkan melalui penyelenggaraan sistem Bimbingan Massal (Bimas). Dengan mengembangkan prosedur perencanaan “bottom up” seperti diuraikan dalam pasal terdahulu, proses pembangunan sistem agribisnis selanjutnya akan berlangsung melalui proses interaksi antara “*delivering system*” yang melakukan penetrasi ke pedesaan (sampai di pusat/Wilud) dengan “*acquiring/receiving system*” (dalam wujud sistem agribisnis). Dalam sistem Bimas peristiwa dan pengertian tentang penetrasi lembaga ekonomi penyangga usaha tani maju (catur sarana) yang diselenggarakan secara berencana dan terkoordinasi itu diberi identitas dengan istilah Bimbingan. Sebagai hasil dari karya bimbingan sistem Bimas itu, maka di pedesaan dengan basis ekologi sawah hadir dan bekerja lembaga sosial ekonomi yang diperlukan untuk mendukung usahatani dalam mengadopsi IPTEK maju guna meningkatkan produktivitas. Dengan sistem Bimas telah dibangun prasarana struktural maupun fungsional dari sistem ekonomi yang terpadu (tidak dualistik), sehingga pertanian dan komunitas desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan ekonomi nasional Indonesia.

Integrasi komunitas desa serta pertanian dengan sistem nasional sebagaimana digambarkan di atas terwujud dengan bertemunya **tatanan penghantar** (*delivering systems*) dengan tatanan peraih (*acquiring/receiving system*). Tatanan penghantar lembaga ekonomi pasar yang diperlukan oleh komunitas pedesaan memerlukan bimbingan untuk hadir di pedesaan, begitu juga komunitas desa memerlukan bimbingan untuk mampu meraih dan memanfaatkan peluang dan pelayanan yang dibawa oleh tatanan penghantar tersebut. Enersi yang memberi daya kepada kedua



tatanan tersebut untuk bertaut adalah kepentingan (*interest*) dari semua komponen system dan masyarakat agribisnis untuk mendapatkan manfaat ekonomi (nilai tambah dan Trilogi Pembangunan) yang maksimal dengan penggunaan sumberdaya secara optimal. Pada awal perintisan dari program swasembada pangan (beras), bimbingan kepada tatanan penghantar berlangsung melalui intervensi, regulasi, investasi, subsidi, komando dan administrasi. Dengan bimbingan demikian itu tatanan penghantar menyebar dan bekerja di pedesaan (sampai di pusat WILUD) untuk penyediaan dan melayani kebutuhan petani akan IPTEK, informasi, sarana, dana dan jasa (pengolahan, transportasi, pemasaran).

Sementara itu bimbingan untuk tatanan peraih berlangsung sebagai proses perubahan perilaku petani dan masyarakat pedesaan dalam beradaptasi terhadap “lingkungan strategik”, melalui proses “*learning by doing*” untuk membangun sikap dan kemampuan “*menolong diri sendiri*” yang ditopang dengan pengejawantahan kemampuan dan dinamika sinergi kerjasama dalam wadah kelompok tani dan koperasi. Ujung tombak operasionalisasi pengemban proses perubahan perilaku itu adalah Penyuluhan Pertanian, yaitu perangkat lembaga pendidikan non formal bagi petani dan keluarganya yang berada di pedesaan dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai fasilitator dan organisatornya. Dengan bimbingan ini tumbuh kemauan dan kemampuan petani untuk meraih dan memanfaatkan dengan berdayaguna apa-apa yang disajikan oleh perangkat penghantar yang berada sampai di pusat WILUD/WKPP.

Apabila dalam karya perencanaan berlangsung proses integrasi yang digambarkan melalui konsep administrasi sebagai bertautnya prakarsa “atas” dan prakarsa “bawah”, maka karya bimbingan gambaran itu diulas melalui konsep hubungan “kota-desa” atau “sentra-kawasan”. Hal itu menunjukkan bahwa proses integrasi pedesaan dengan sistem nasional berlangsung dalam dimensi vertikal maupun horisontal. Jadi dalam konsep bimbingan itu perangkat penghantar yang datang dari “kota” bukanlah pembimbing yang berhadapan dengan perangkat



peraih sebagai yang “dibimbing”, keterkaitan itu tidak dalam konteks hubungan “subyek-obyek” tapi dalam konteks “subyek-subyek” yang berinteraksi dalam konsep “penghasil-pemakai” (*producer-consumer*). Semua peserta dalam karya bimbingan ini adalah subyek yang (sebagai “*producer*” ataupun “*consumer*”) berusaha meraih “nilai” ekonomi (nilai tambah, keuntungan, manfaat) maupun non ekonomi. Maka yang membimbing adalah program yang mendefinisikan secara spesifik apa, siapa, dimana, berapa, dan bagaimana “nilai” yang menjadi kepentingan dari masing-masing peserta karya bimbingan itu. Maka dapat dikatakan bahwa karya bimbingan adalah suatu model dari transformasi sosial yang berlangsung melalui “*learning process*”

Sebagai periode awal pembangunan yang meletakkan kerangka landasan pembangunan, maka selama PJP I program yang menjadi prioritas acuan dan mendominasi karya perencanaan maupun karya bimbingan transformasi (pembangunan) pertanian/pedesaan adalah program yang “turun dari atas” dan program yang “menyebar dari pusat/sentra pengembangan”. Program yang membimbing masyarakat untuk berperan serta sebagai pelaku dalam proses perubahan perilaku itu tertata dalam berbagai lapisan interaksi, yaitu pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan wilayah serta “kawasan”. Tataan interaksi berlapis inilah yang menjadi pranata instrumental dari manajemen sistem bimbingan dan sekaligus sistem penyelenggaraan program pembangunan pertanian/pedesaan, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi proses pembangunan selanjutnya. Bekerjanya tatanan penyelenggaraan program yang berlapis itu sampai saat ini berkembang berkat daya kepemimpinan yang dipancarkan oleh aparat pemerintah. Tataan penyelenggaraan berlapis ini diperlukan juga untuk bekerjanya masyarakat yang mandiri dan bergerak dinamik dengan daya dorong kekuatan dan kemampuan internalnya sendiri dimana pemerintah tidak lagi menjadi pemrakarsa utama dan masyarakat (dunia usaha, swasta) tampil sebagai pemrakarsa dan penggerak pembangunan itu. Pihak manapun yang memegang tampuk kendali sistem bimbingan, pranata tatanan berlapis itu tetap menjadi instrumen yang diperlukan bagi terselenggaranya setiap program yang digelar melalui proses interaksi tatanan

penghantar - tatanan peraih di pedesaan. Ini berarti bahwa pembangunan sistem agribisnis pun berlangsung melalui **tatanan bimbingan berlapis**.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi bimbingan yang mewadahi proses perubahan tata laku dan perilaku adalah organisasi koordinasi yang berlapis, dengan simpul-simpul koordinasi dari tatanan penghantar (*delivering system*) dan simpul koordinasi komunitas pedesaan (petani). Dalam kasus program swasembada pangan simpul-simpul koordinasi aparatur penghantar itu adalah Badan Pengendali Bimas di Pusat, Satuan Pembina Bimas di Propinsi dan Satuan Pelaksana Bimas di Kabupaten, kesemuanya dilengkapi dengan Forum Musyawarahnya dan Sekretariatnya. Simpul-simpul koordinasi dari para petani secara lengkap terlihat dalam pola organisasi Supra Insus; dimana ada Pos Simpul Koordinasi (Posko) petani yaitu Posko A pada tingkat kelompok hamparan, Posko B antar kelompok dalam satu WKPP, dan Posko C pada tingkat KUD Bidang singgung antara penghantar (aparatur) dengan peraih (petani) dalam pola bimbingan yang sudah berkembang melalui sistem Bimas itu juga terjadi secara berjenjang.

Dengan pola bimbingan yang sudah ada di lapangan ini sebagai landasan, maka bimbingan dalam membangun, mengembangkan, memacu, mengarahkan, memantau dan mengendalikan agribisnis dapat dikembangkan sebagai upaya penyesuaian, peningkatan, pendalaman, dan perluasan dari pola bimbingan yang sudah dirintis oleh sistem Bimas. Maka tidak perlu dibentuk Badan Koordinasi serta sistem koordinasi yang baru. Dengan penyesuaian pada keanggotaan forum musyawarah, Tim Akhli, Tim Teknik, serta penyesuaian; peningkatan dan pendalaman aparatur Penyuluhan, Diklat dan Litbang, gerakan masyarakat membangun agribisnis dapat berlangsung dengan tertib, tertata, dinamik dan berdayaguna. Penyesuaian dan penataan ulang itu harus dilakukan pada semua tingkat/jenjang.

Yang perlu mendapat sorotan khusus adalah perubahan posisi kepemimpinan. Apabila pada organisasi dan sistem Bimas, tampuk kepemimpinan itu berada pada pimpinan pemerintahan (Pusat/Daerah/wilayah), maka dalam agribisnis



kepemimpinan itu bertumpu kepada Perusahaan Pembimbing (ialah perusahaan yang menjadi penentu jatidiri kesatuan sistem agribisnis spesifik lokalita dan yang bertindak sebagai simpul penentu keputusan “bisnis” atau investasi). Pada setiap satuan usaha agribisnis ada satu perusahaan pembimbingnya; dan skala usaha agribisnis diukur dengan parameter skala usaha dari perusahaan pembimbingnya. Perusahaan pembimbing adalah pemegang tampuk kendali dan tanggung jawab utama dari satuan usaha sistem agribisnis spesifik lokalita. Dengan gambaran struktur pimpinan yang demikian itu, segera dapat ditangkap perbedaan bobot wewenang penyelenggaraan program; pada Bimas program itu bersifat program nasional yang kuantitatif, sehingga keberadaan pusat sangat dominan; pada pengembangan agribisnis program itu bersifat spesifik lokalita, sehingga keputusan setempat (desentralisasi, otonomi, dekonsentrasi) tampil lebih menonjol peranannya. Maka Kabupaten menjadi simpul koordinasi yang strategis sejalan dengan kebijakan otonomi pemerintahan, desentralisasi perencanaan pembangunan, penetapan Tata Ruang dan koordinasi penanaman modal.

Dengan demikian perusahaan pembimbing yang menjadi titik pusat simpul pemadu Tatanan Peraih (*Aquiring/Receiving System*), akan berhadapan dengan simpul pemadu Tatanan Penghantar yang berada di tingkat kabupaten. Fasilitator dari pertautan tatanan penghantar dengan tatanan peraih itu adalah Satuan Pelaksana Bimas, yang susunannya sudah disesuaikan dengan keadaan setempat. Pada umumnya dapat dikemukakan bahwa personalia Perusahaan Pembimbing secara sosial mempunyai “orbit” interaksi (“lobby”) pada tingkat kabupaten. Dengan demikian interaksi antara aparatur Penghantar dengan Perusahaan Pembimbing akan mempunyai warna bernuansa “persamaan tingkat sosial” (*egalitarian*) dan kurang berwawasan interaksi “patron-klien” atau “priyayi-tani” yang berkonotasi interaksi “atas bawah”.

Kalau pada Bimas pangan, yang tampil sebagai wadah proses perubahan perilaku adalah komunitas desa, maka dalam pembangunan agribisnis wadah itu adalah satuan system agribisnis dengan Perusahaan Pembimbing sebagai intinya.



Maka proses perubahan tatalaku dan perilaku itupun akan berlangsung dalam konteks tatalaku investasi, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal terdahulu. Pembentukan dan pengembangan tatalaku dan perilaku itu berlangsung sebagai suatu "*learning process*" yang dalam Bimas ujung tombaknya adalah lembaga penyuluhan pertanian. Untuk program agribisnis penyuluhan saja tidak cukup, karena Perusahaan Pembimbing secara sosial berada di luar jangkauan atau "*orbit*" lembaga penyuluhan.

Meskipun lembaga penyuluhan tetap diperlukan dan harus diperkuat dan ditingkatkan kompetensinya, tetapi bagi pembangunan agribisnis diperlukan hadirnya lembaga lain yang akan mendampingi Perusahaan Pembimbing dalam kerjanya sehari-hari di pedesaan. Lembaga yang dibutuhkannya itu adalah **lembaga konsultasi** yang kompeten di pedesaan, lembaga pengembangan SDM yang profesional, serta program "*learning process*" yang efektif. Maka ujung tombak dari bimbingan sistem agribisnis di pedesaan akan menjadi:

1. Penyuluhan pertanian yang didukung baik oleh Litbang dan Diklat (BPP, BPTP, Balai Latihan)
2. Kelompok jasa konsultan.
3. Kelompok pakar (Universitas/Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi Keilmuan, LSM, dll).
4. Program "Inkubator".
5. Program Penataran Agribisnis.
6. Program Anugerah MUKIBAT.



Koordinasi

Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan agribisnis diperlukan kelembagaan koordinasi yang dapat menggerakkan seluruh kelembagaan pelaku agribisnis. Dengan demikian kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan pembinaan dapat dilaksanakan dengan serasi dan berkesinambungan, serta berlandaskan pada prinsip fungsionalisasi yaitu, (a) adanya kelembagaan koordinasi yang memungkinkan semua fungsi organisasi dapat tertampung, (b) adanya pembinaan kelembagaan, (c) adanya depersonalisasi kepemimpinan untuk mengurangi ketergantungan pada seorang pejabat, (d) adanya tatakerja yang jelas, (e) adanya forum koordinasi yang efektif, (f) adanya informasi pimpinan yang menyeluruh, dan (g) adanya jalur informasi yang multi arah.

Kelembagaan koordinasi dalam penyelenggaraan pengembangan agribisnis disusun dengan memperhatikan konsepsi, strategi dan kebijaksanaan di dalam pengembangan agribisnis dan tumbuhnya kecenderungan dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan nasional pada PJPT II, yang dicirikan oleh (a) tuntutan kesempatan berusaha yang semakin besar, (b) demokratisasi atau keterbukaan, (c) berubahnya orientasi pelayanan terhadap masyarakat dari pendekatan kekuasaan kepada pendekatan kesisteman, dan (d) manajemen yang transparan.

Kelembagaan Koordinasi Pengembangan Agribisnis

Pola pengembangan struktur pedesaan maju yang dikenal dengan sistem Bimas telah memberikan andil yang sangat besar bagi tercapainya swasembada beras dan terus meningkatnya produksi dan produktifitas beberapa komoditas strategis lainnya. Penyelenggaraan kegiatannya dilakukan oleh Badan Pengendali Bimas sebagai lembaga koordinasi lintas sektoral dan regional. Kelembagaan koordinasi Bimas tersebut dapat dimanfaatkan dan dipandang masih relevan untuk mengakomodasikan adanya reorientasi pemikiran dalam pembangunan pertanian pada PJPT II dari orientasi produksi kepada pendekatan sistem agribisnis yang mempunyai nilai strategis jangka panjang untuk menyongsong liberalisasi perdagangan internasional dan khususnya dalam upaya tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan.



Di dalam pelaksanaannya, Menteri Pertanian melalui surat Nomor OT.210/288/Mentan/IX/94 tertanggal 12 September 1994, telah meminta kepada para Gubernur/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dan Bupati/ Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kaupaten di seluruh Indonesia, untuk dapat memanfaatkan jalur koordinasi Bimas dalam perencanaan dan pembinaan kegiatan pengembangan agribisnis. Kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan peraturan mengenai penyelenggaraan Bimas. Ketetapan yang tercantum pada Keppres N0.84 tahun 1993 tentang organisasi Bimas, yaitu pada pasal 3 masih memungkinkan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas untuk memperluas keanggotaan Badan Pengendali Bimas, Satuan Pembina Bimas Propinsi, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, Kecamatan dan Desa seta keanggotaan Tim Ahli dan Tim Teknis Bimas. Dengan demikian perangkat kelembagaan koordinasi Bimas dapat mengakomodasikan semua organisasi pelaku agribisnis, sehingga diharapkan dapat melaksanakan konsepsi, strategi dan kebijaksanaan pengembangan agribisnis.

Lembaga Koordinasi Di Tingkat Pusat

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan agribisnis di tingkat Pusat dilakukan dengan memanfaatkan wadah/organisasi Bimas sbb:

a. Badan Pengendali Bimas

1. Badan Pengendali Bimas yang Ketuanya dijabat oleh Menteri Pertanian, keanggotaannya diperluas dengan melibatkan unsur-unsur lain yang terkait dalam kegiatan agribisnis, yaitu:
 - (1) Kepala Badan Agribisnis;
 - (2) Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian;
 - (3) Wakil Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - (4) Wakil Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
 - (5) Wakil Departemen Perhubungan;
 - (6) Wakil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - (7) Menteri Negara Riset dan Teknologi;



- (8) **Badan Pertanahan Nasional;**
- (9) **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);**
- (10) **Badan Pengendali Dampak Lingkungan/Menteri Negara Lingkungan Hidup.**

2. **Kepala Badan Agribisnis dalam keanggotaan Badan Pengendali Bimas mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas, di dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengembangan agribisnis, yang meliputi:**

- (1). **menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kebijaksanaan lintas sektoral dan regional dalam pengembangan agribisnis.**
- (2). **melakukan koordinasi perumusan pokok-pokok pengembangan usaha di bidang agribisnis.**
- (3). **melakukan koordinasi pembinaan dan supervisi umum dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis.**

b. Tim Ahli Bimas

Dalam rangka penyusunan konsepsi dan strategi serta perumusan kebijaksanaan lintas sektoral pengembangan agribisnis, Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas dibantu oleh Tim Ahli Bimas yang telah ada, dengan memperluas keanggotaannya agar semua unsur masyarakat agribisnis yang terdiri dari para pakar dan ilmuwan, swasta, asosiasi, masyarakat tani dapat terwakili.

c. Tim Teknis Bimas

Untuk menjabarkan konsepsi, strategi dan pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan agribisnis ke dalam kebijaksanaan teknis dan langkah-langkah operasional, Kepala Badan Agribisnis dapat memanfaatkan Tim Teknis Bimas yang keanggotaannya diperluas sehingga terdiri dari pejabat atau tenaga teknis

di lingkungan Departemen dan lembaga non Departemen yang terkait dalam pengembangan agribisnis.

- d. **Tim Ahli Bimas dan Tim Teknis Bimas, secara teknis dibantu oleh Kelompok-kelompok Kerja pengembangan agribisnis yang ada di lingkungan Badan Agribisnis.**

Lembaga Koordinasi Di Tingkat Daerah

Kelembagaan koordinasi pengembangan agribisnis pada dasarnya *konkordan* dengan kelembagaan koordinasi ditingkat Pusat. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan agribisnis dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu Gubernur/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dan Bupati/Ketua Satuan Pembina Bimas Kabupaten selaku administrator tunggal yang mempunyai kewenangan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di wilayah/daerah tingkat I dan tingkat II, yang meliputi Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah Pusat yang ada di daerah.

Lembaga Koordinasi Di Tingkat Propinsi

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan agribisnis ditingkat Propinsi dilakukan dengan memanfaatkan wadah organisasi Bimas ditingkat propinsi, yaitu:

- a. **Satuan Pembina Bimas Propinsi**

Dalam rangka mengkoordinasikan upaya pengembangan agribisnis di wilayah, Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi yang dijabat oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, keanggotaannya diperluas, dengan melibatkan semua unsur yang terkait dalam pengembangan agribisnis, yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengendali Bimas dan setelah memperhatikan usul/saran dari Kepala Badan Agribisnis.



b. Ka. Kanwil/Ketua Pembina Harian Bimas (KPHB).

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian selaku Ketua Pembina Harian Bimas, membantu Gubernur/Ketua Satuan Pembina Bimas di dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan agribisnis di wilayah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas.

c. Sekretaris Pembina Harian Bimas Tingkat I (SPHB I).

Di dalam pelaksanaan koordinasi pengembangan agribisnis di wilayah, Sekretaris Pembina Harian Bimas Tingkat I mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan rapat-rapat koordinasi.
2. Merumuskan kesimpulan rapat.
3. Melaksanakan pelayanan kegiatan administrasi dan teknis.

d. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Cq. Bidang Pertanian Umum di dalam pengembangan agribisnis mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan dan menyusun materi rapat.
2. Merumuskan materi-materi rapat koordinasi yang berasal dari instansi vertikal lainnya dan Dinas-Dinas Otonom.
3. Menyusun perencanaan pengembangan agribisnis.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan agribisnis.
5. Menyusun laporan berkala.

Tim Ahli Bimas Propinsi

Dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan koordinasi perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan agribisnis sesuai dengan potensi wilayah, Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dibantu oleh Tim Ahli Bimas Propinsi, yang susunan keanggotaannya ditetapkan setelah memperhatikan petunjuk Kepala Badan Agribisnis.



f. Tim Teknis Bimas Propinsi

Dalam mempersiapkan langkah-langkah operasional, kepada Ka.Kanwil selaku Ketua Harian Satuan Pembina Bimas Propinsi, dibantu oleh Tim Teknis Bimas dan persiapan materi teknisnya dilakukan oleh Kelompok-kelompok Kerja dalam pengembangan agribisnis, yang keanggotaannya disusun atas petunjuk Badan Agribisnis.

Lembaga Koordinasi Di Tingkat Kabupaten

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan agribisnis ditingkat Kabupaten dilakukan dengan memanfaatkan wadah organisasi Bimas, yaitu:

a. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan agribisnis di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Satuan Pembina Bimas Kabupaten, dan dibantu oleh para pejabat dari instansi yang terkait dalam pengembangan agribisnis sebagai anggota dan ditetapkan sesuai dengan petunjuk Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi.

b. Tim Teknis Bimas Kabupaten

Dalam rangka mempersiapkan rumusan langkah-langkah operasional pengembangan agribisnis sesuai dengan potensi wilayah, Ketua Satuan Pembina Bimas Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis Bimas Kabupaten yang dipimpin oleh SPHB II, dan susunan keanggotaannya ditetapkan sesuai dengan petunjuk yang akan dikeluarkan oleh Ketua Harian Satuan Pembina Bimas Propinsi.



c. Sekretariat Pelaksana Harian Bimas Tingkat II (SPHB II)

Untuk membantu Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dalam pengembangan agribisnis di daerah tingkat II, Sekretariat Pelaksana Harian Bimas Tingkat II mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan rapat-rapat koordinasi.
2. Merumuskan langkah-langkah operasional pelaksanaan kegiatan agribisnis.
3. Menyusun perencanaan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Lembaga Koordinasi Di Tingkat Kecamatan

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan agribisnis di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari semua pelaku agribisnis ditingkat Kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Camat dibantu oleh seorang PPL Senior.

Lembaga Koordinasi Di Tingkat Desa

Basis pengembangan agribisnis didasarkan pada agroekosistem yang memiliki skala usaha yang ekonomis dalam kawasan satu wilayah unit desa (WILUD). pelaksanaan kegiatan agribisnis di tingkat WILUD dilakukan oleh Kepala Desa selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas di tingkat Desa, yang keanggotaannya terdiri dari pelaksana kegiatan agribisnis.



VIII. PENUTUP

Pembangunan pertanian berwawasan agribisnis pada Pelita VI khususnya dan PJPT II pada umumnya, bukan lagi sekedar bertumpu pada persoalan produksi semata-mata, akan tetapi lebih berwawasan kepada peningkatan pendapatan dan mutu kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian upaya penting daripadanya adalah bagaimana sejauh mungkin menangkal eksek negatif yang ditimbulkan oleh distorsi yang dapat ditimbulkan oleh ekonomi pasar.

Lebih dari itu, sebenarnya dipandang dari berbagai aspek yang diuraikan baik lingkungan strategis, permintaan, sumberdaya maupun teknologi telah memberikan pengertian bahwa peluang (*opportunity*) untuk menumbuh-kembangkan wawasan agribisnis relatif sangat besar. Namun demikian, peluang tersebut hanya akan dapat direalisasikan manakala mampu ditumbuhkan **perekayasa (perakitan)** berbagai aspek di atas pada tingkatan lokalita (**kawasan**) yang bersifat spesifik. Untuk ini, tampaknya keterkaitan peran kaum intelektual (para pakar) dan dunia usaha serta pemerintah dalam pola simbiose mutualistik mutlak menjadi sangat penting, sehingga nilai tambah yang ditimbulkan dari setiap kegiatan di sektor pertanian menjadi lebih banyak ditangkap oleh masyarakat petani sebagai subyek pembangunan pertanian.

Sejalan dengan itu, segenap inisiatif masyarakat dan dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan tujuan tersebut harus selalu bermuara pada upaya menerjemahkannya ke dalam sistem agribisnis, yang selain memperluas dan memperdalam nilai tambah juga harus mampu memperluas kesempatan kerja. Dalam kaitan inilah diperlukan sinkronisasi terhadap **tatalaksana pengembangan agribisnis**, terutama **menyangkut aspek perencanaan dan rancang bangun pengembangannya**, **aspek bimbingan serta aspek koordinasinya**.

Manakala karya masyarakat dan sistem agribisnis dilakukan secara berencana seperti pedoman di atas, diharapkan akan terwujud perkembangan agribisnis yang spontan dalam masyarakat. Dan manakala hal itu sudah terwujud, kita patut berkata **bahwa pertanian Indonesia sudah tinggal landas**.

